

**2019**

# **LAPORAN KINERJA**

## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan bentuk laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Kinerja ini menyajikan data capaian keberhasilan terhadap sasaran capaian Pembangunan yang diperjanjikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

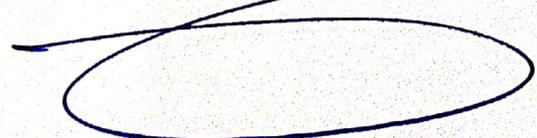
Informasi data capaian terhadap 9 tujuan dan 10 indikator kinerja tujuan serta 22 Sasaran dan 37 Indikator kinerja sasaran yang meliputi bidang perekonomian, infrastruktur dan sosial budaya provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, khususnya Badan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan semua unit terkait kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mengharapkan tanggapan dan saran guna peningkatan mutu pelaporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan untuk kepentingan berbagai analisis dan perencanaan kebijakan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merasakan manfaat yang lebih luas dari peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

*Wassalammualaikum Wr. Wb.*

Pangkalpinang, Maret 2020  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



**ERZALDI ROSMAN**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen strategis yang prosesnya dimulai dari penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis Jangka Menengah Organisasi. Rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan ditetapkan komitmennya dalam Perjanjian Kinerja (PK). Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja . Laporan Kinerja memuat informasi penting dan relevan bagi pengguna laporan, yaitu unsur pimpinan eksekutif, unsur pengawasan dan perencanaan.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan implementasi sistem akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, maupaun upaya pemecahan permasalahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan ini memuat tingkat capaian dan realisasi anggaran dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance Result*) yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri yaitu SKPD-SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan dalam memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017. Disisi lain juga pengukuran tersebut berguna bagi pembelajaran Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Di pihak eksternal yaitu adanya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas jalannya roda pemerintahan, pengukuran kinerja bermanfaat sebagai bahan pengawasan jalannya roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengukur capaian tujuan pada tahun 2019, telah menetapkan indikator kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun ke depan (2017-2022).

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dengan alat ukur indikator kinerja, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Tahun 2019, mulai dari pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 20 sasaran dan 28 indikator kinerja sasaran.

2. Dari indikator kinerja tersebut, dapat dijabarkan secara rinci melalui pengukuran capaian indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 16 indikator kinerja sasaran dengan capaian **sangat berhasil**, 10 indikator kinerja sasaran dengan capaian **berhasil**, dan 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian **kurang berhasil**.
3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah :
  - a. Meningkatnya produksi Sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, realisasi kinerja sebesar 86,12 %.
  - b. Meningkatnya produksi Sub sektor perikanan, realisasi kinerja mencapai 210,64 % dengan efisiensi sebesar 44,20 %.
  - c. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata, realisasi kinerja mencapai 112,68 % dengan efisiensi sebesar 14,06 %.
  - d. Meningkatnya produksi sektor pertambangan, realisasi kinerja mencapai 152,63% dengan efisiensi sebesar 45,27 %.
  - e. Terwujudnya kemandirian energi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 75,09%.
  - f. Menurunnya pengangguran, realisasi kinerja mencapai 154,69% dengan efisiensi sebesar 10,96%.
  - g. Menurunnya kemiskinan, realisasi kinerja mencapai 114,44% dengan efisiensi sebesar 10,96%.
  - h. Menurunnya inflasi, realisasi kinerja mencapai 240,83% dengan efisiensi sebesar 25,13%.
  - i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, realisasi kinerja mencapai 105,55% dengan efisiensi sebesar 12,71%.
  - j. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan indikator Kinerja sebagai berikut :
    - Rasio ketersediaan transportasi layak jalan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 8,05%.
    - Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi, realisasi kinerja mencapai 210% dengan efisiensi sebesar 2,98%.

- Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 26,06 %.
- k. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat, realisasi kinerja mencapai 101,91% dengan efisiensi sebesar 25,24%.
- l. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - Angka harapan hidup, realisasi kinerja mencapai 100,48% dengan efisiensi sebesar 18,20 %
  - Angka Kematian Bayi, realisasi kinerja mencapai 100,11, dengan efisiensi sebesar 12,33 %.
  - Angka stunting, realisasi kinerja mencapai 363, 63% dengan efisiensi sebesar 27,88%.
- m. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 37,69%.
  - Indeks Reformasi Birokrasi, realisasi kinerja mencapai 102,21% dengan efisiensi sebesar 12,68 %
- n. Meningkatnya kebebasan sipil, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 11,06%.
- o. Meningkatnya aspek hak-hak politik, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 22,5 %.
- p. Meningkatnya aspek lembaga demokrasi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 47,54 %.
- q. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana, realisasi kinerja mencapai 120% dengan efisiensi sebesar 14,98 %
- r. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kinerja mencapai 107,93 % dengan efisiensi mencapai 29,39 %.

4. Total efisiensi anggaran sebesar **Rp. 103.541.663.826,-** jumlah tersebut berasal dari efisiensi 18 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.   Latar Belakang.....	1
B.   Maksud dan Tujuan .....	2
C.   Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	3
D.   Isu Strategis Daerah .....	24
E.   Sistematika Penyajian .....	27
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	29
A. Rencana Strategis .....	29
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	41
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	46
D. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	48
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	66
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 .....	66
B. Analisis Capaian Kinerja .....	71
C. Akuntabilitas Keuangan.....	121
1. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	121
2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	129
3. Analisis Efisiensi.....	134
D. Langkah Dimasa Yang Akan Datang.....	138

BAB IV PENUTUP ..... 136

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ... ..	4
Tabel	1.2	Luas Lahan.....	19
Tabel	2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	37
Tabel	2.2	Sasaran Strategis dan IKU .....	42
Tabel	2.3	Perjajian Kinerja .....	47
Tabel	2.4	Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran.....	49
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja .....	67
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	68
Tabel	3.3	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	72
Tabel	3.4	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	72
Tabel	3.5	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	72
Tabel	3.6	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	75
Tabel	3.7	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	76
Tabel	3.8	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	77
Tabel	3.9	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	78
Tabel	3.10	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	78
Tabel	3.11	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	79
Tabel	3.12	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	80
Tabel	3.13	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	81
Tabel	3.14	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	81
Tabel	3.15	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	83
Tabel	3.16	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	84
Tabel	3.17	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	84
Tabel	3.18	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	85
Tabel	3.19	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	88

Tabel	3.20	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	88
Tabel	3.21	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	89
Tabel	3.22	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	90
Tabel	3.23	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	90
Tabel	3.24	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	91
Tabel	3.25	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	93
Tabel	3.26	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	93
Tabel	3.27	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	94
Tabel	3.28	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	94
Tabel	3.29	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	94
Tabel	3.30	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	95
Tabel	3.31	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	96
Tabel	3.32	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	96
Tabel	3.33	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	96
Tabel	3.34	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	97
Tabel	3.35	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	98
Tabel	3.36	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	98
Tabel	3.37	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	99
Tabel	3.38	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	99
Tabel	3.39	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	100
Tabel	3.40	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	100
Tabel	3.41	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	101
Tabel	3.42	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	101
Tabel	3.43	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	101
Tabel	3.44	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	102
Tabel	3.45	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	102
Tabel	3.46	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	103
Tabel	3.47	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	103
Tabel	3.48	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	104
Tabel	3.49	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	105

Tabel	3.50	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	105
Tabel	3.51	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	106
Tabel	3.52	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	106
Tabel	3.53	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	107
Tabel	3.54	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	107
Tabel	3.55	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	108
Tabel	3.56	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	108
Tabel	3.57	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	108
Tabel	3.58	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	109
Tabel	3.59	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	109
Tabel	3.60	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	110
Tabel	3.61	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	110
Tabel	3.62	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	110
Tabel	3.63	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	111
Tabel	3.64	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	111
Tabel	3.65	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	112
Tabel	3.66	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	112
Tabel	3.67	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	113
Tabel	3.68	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	113
Tabel	3.69	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	114
Tabel	3.70	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	114
Tabel	3.71	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	115
Tabel	3.72	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	115
Tabel	3.73	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	116
Tabel	3.74	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	116
Tabel	3.75	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	117
Tabel	3.76	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	117
Tabel	3.77	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	118
Tabel	3.78	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	118
Tabel	3.79	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	119

Tabel	3.80	Pencapaian Target Kinerja Sasaran .....	119
Tabel	3.81	Pencapaian target kinerja dengan Target RPJMD .....	120
Tabel	3.82	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	120
Tabel	3.83	Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 .....	124
Tabel	3.84	Proporsi PAD Tahun 2019 .....	125
Tabel	3.85	Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019 .....	125
Tabel	3.86	Belanja Langsung Tahun 2019.....	128
Tabel	3.87	Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 .....	128
Tabel	3.88	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	130



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk .....	5
Gambar 1.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk .....	6
Gambar 1.3	Penduduk yang Bekerja berdasarkan Lapangan Usaha .....	7
Gambar 1.4	Grafik Perkembangan PDRB .....	8
Gambar 1.5	Laju pertumbuhan Ekonomi .....	9
Gambar 1.6	Laju Inflasi .....	10
Gambar 1.7	Peta Geologi .....	19
Gambar 1.8	Peta Tutupan Lahan .....	20
Gambar 1.9	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah .....	21
Gambar 1.10	Umur Harapan Hidup .....	22
Gambar 3.1	Perbandingan Persentase skala pengukuran Capaian Kinerja	71
Gambar 3.2	Perbandingan target PDRB dengan Realisasi Capaian .....	73
Gambar 3.5	Struktur Belanja Daerah .....	127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam ketentuan umum Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja dalam hal ini diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja yaitu dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis.

Laporan Kinerja ini menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan Laporan Kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Tujuan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan negara diantaranya adalah membangun pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat; penajaman penerapan program dan kegiatan pembangunan dan mencegah

penggunaan anggaran bagi kegiatan yang bukan prioritas; tersedianya laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan; mendorong pertanggungjawaban instansi pemerintah yang transparan dan terbuka; serta memberikan dasar berbasis kinerja bagi pemerintah untuk menghindari praktik KKN dalam penyelenggaraan kegiatan negara.

Secara praktis, penyelenggaraan SAKIP dalam instansi pemerintah memunculkan dua keluaran terukur yaitu berupa laporan keuangan yang kemudian diaudit dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja telah menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penyempurnaan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja utama, mulai dari rencana strategis (Renstra), rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu, menyusun penjabaran kinerja utama dari level Visi Misi Gubernur sampai dengan satuan kerja dibawahnya serta kinerja individu yang mengacu pada arsitektur kinerja yang baik. serta membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas perjanjian kinerja yang telah disepakati secara berjenjang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui TAP MPR Nomor IX Tahun 1998.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan

Kinerja Instansi Pemerintah menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **1. Kondisi Geografi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31. Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sebelumnya merupakan wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 dibentuklah daerah pemekaran yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, maka dengan demikian wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019**

<b>Nama Kota/Kabupaten</b>	<b>Nama Ibu Kota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	81	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	64	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	63	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	53	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	49	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	39	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	42	118,80
Luas Daratan				<b>16.424,23</b>
Luas Laut				<b>65.301,00</b>
<b>Provinsi Kep. Babel</b>		<b>47</b>	<b>391</b>	<b>81.725,23</b>

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2019

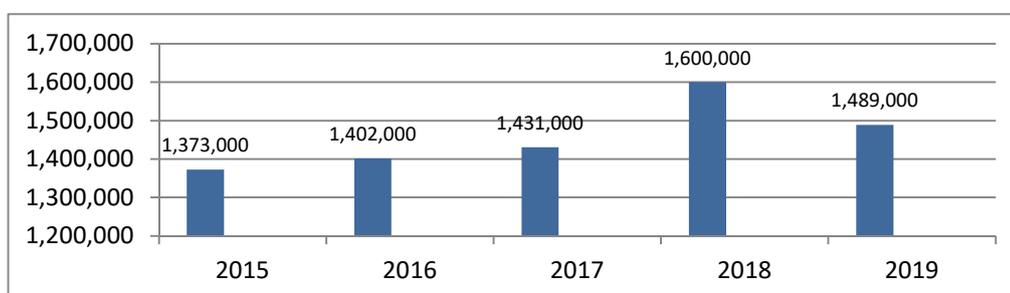
Secara Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada  $104^{\circ}50'$  sampai  $109^{\circ}30'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}50'$  sampai  $4^{\circ}10'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah Barat dengan Selat Bangka, Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai  $81.725,14 \text{ km}^2$ . Luas daratan lebih kurang  $16.424,14 \text{ km}^2$  atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih  $65.301 \text{ km}^2$  atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Kondisi Demografi

Berdasarkan Buku Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi pada tahun 2019 sebesar 1.488.792 orang, dengan laju pertumbuhan tahun 2018-2019 sebesar 2,7 persen. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 774.523 orang dan penduduk perempuan sebanyak 714.269 orang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 108,4. Perkembangan pertambahan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2015- 2019 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk

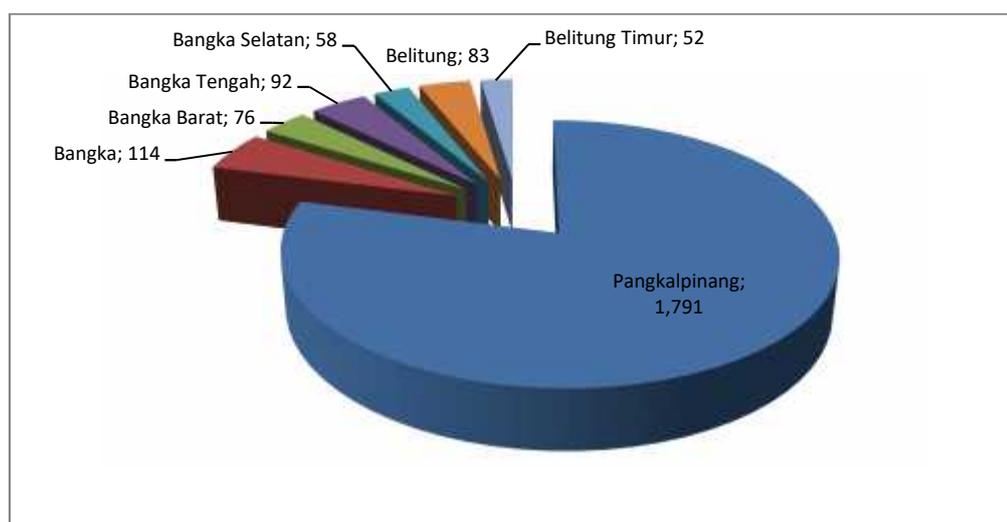


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan distribusi dan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 91 orang per  $\text{km}^2$ . Bila dilihat berdasarkan

Kabupaten/Kota, maka Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.791 orang per km<sup>2</sup> dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 52 orang per km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya distribusi dan kepadatan penduduk disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.2  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk



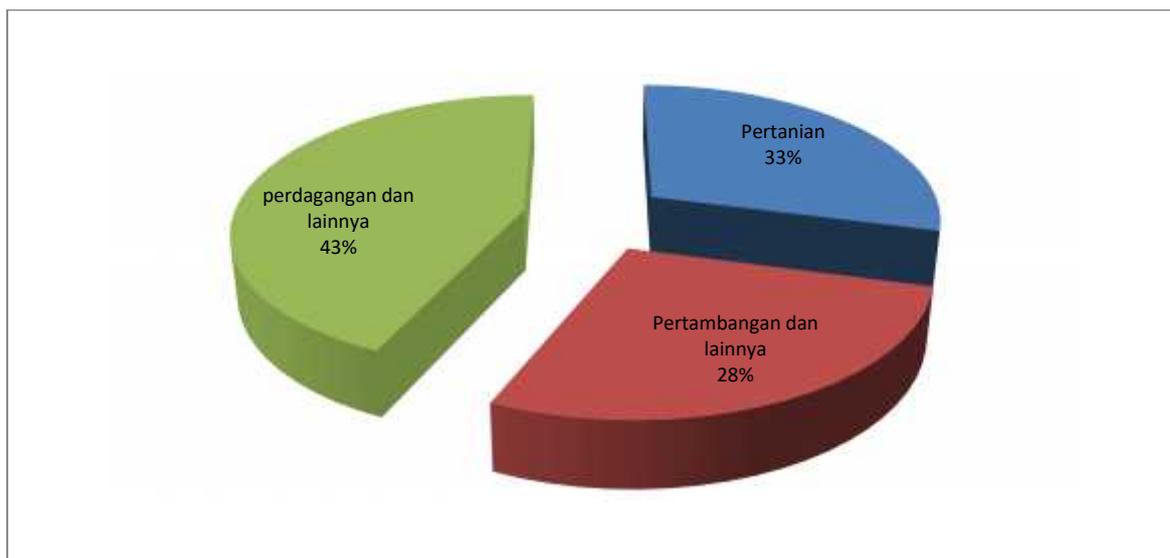
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung usia 15 tahun ke atas yang termasuk penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2019 sebanyak 1.097.261 orang (sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 67,70 persen artinya sebesar 67,70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kepulauan Bangka Belitung yang sama sebesar 3,62 persen .

Menurut lapangan pekerjaan tampak bahwa 208.253 penduduk usia kerja (PUK) bekerja disektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 197.213 orang di sektor Pertambangan, penggalian ,industri pengolahan, pengadaan listrik/gas, pengadaan air, pengelolaan sampah/limbah/daur ulang dan konstruksi; 310.461 orang disektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa

Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya persentase lapangan usaha disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.3  
Penduduk yang bekerja berdasarkan Lapangan Usaha  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

### 3. Kondisi Makro Ekonomi

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRD)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

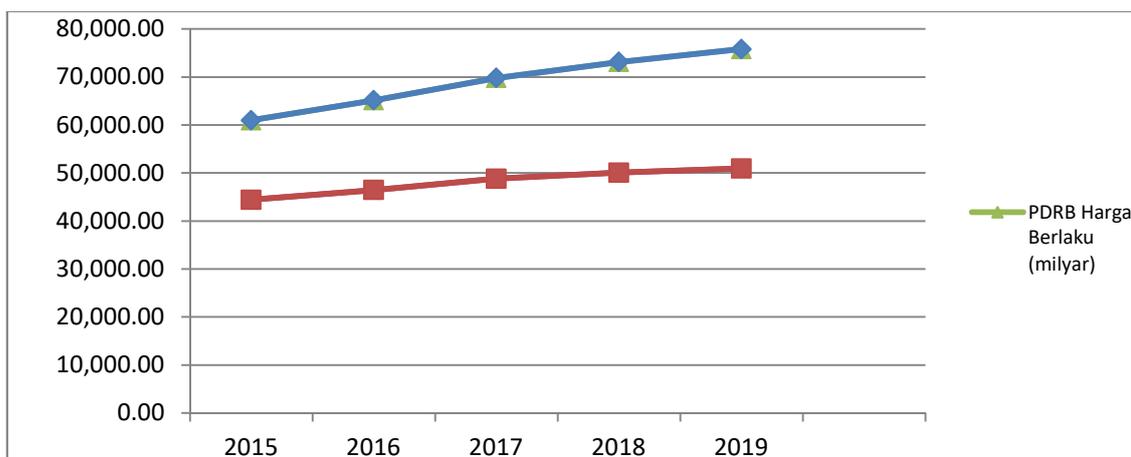
PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber

daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Buku Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai PDRB harga berlaku tahun 2018 sebesar 73.121,0 milyar dan nilai PDRB harga berlaku tahun 2019 sebesar 75.829,3 milyar sedangkan PDRB perkapita harga berlaku tahun 2018 sebesar 50.050.000 juta dan PDRB perkapita harga berlaku tahun 2019 sebesar 50.930.000 juta.

Gambar 1.4

Grafik Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



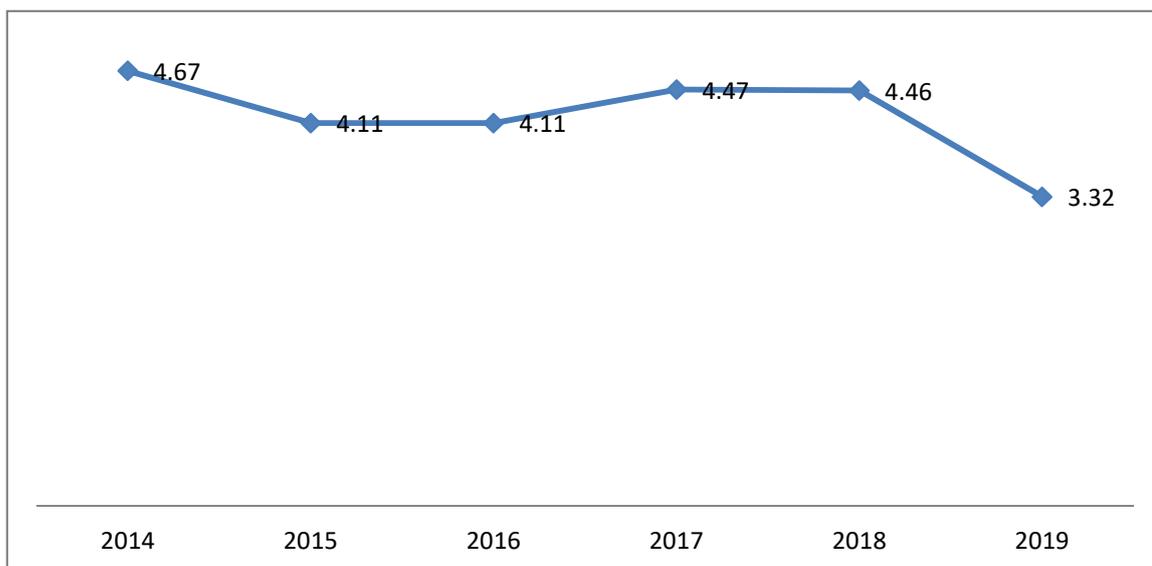
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 3,32 persen, Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 di topang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan dengan kontribusi dan penyumbang pertumbuhan tertinggi, kelapa sawit, karet, lada, dan perikanan merupakan komoditas yang mampu mendorong perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berdasarkan tahun 2018 sebesar 4,46 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 3,32 persen. Untuk melakukan analisa perbandingan laju pertumbuhan ekonomi, disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.5  
Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Perekonomian Bangka Belitung tahun 2019 tumbuh 3,32 persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,46 persen. seluruh lapangan usaha yang ada dalam perekonomian kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif di tahun 2019, namun pada lapangan usaha yang kontribusinya besar pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2018 yang lalu. pada lapangan usaha perkebunan yang merupakan salah satu kontributor terbesar lapangan usaha ini, rendahnya harga komoditas strategis perkebunan bangka belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada pada tahun 2019 membuat produktifitas menurun. demikian juga dengan lapangan usaha industri pengolahan yang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4 persen , namun pada tahun 2019 melambat sebesar 1,17 persen. kendala aturan pemerintah membuat perusahaan Semelter swasta yang ada di

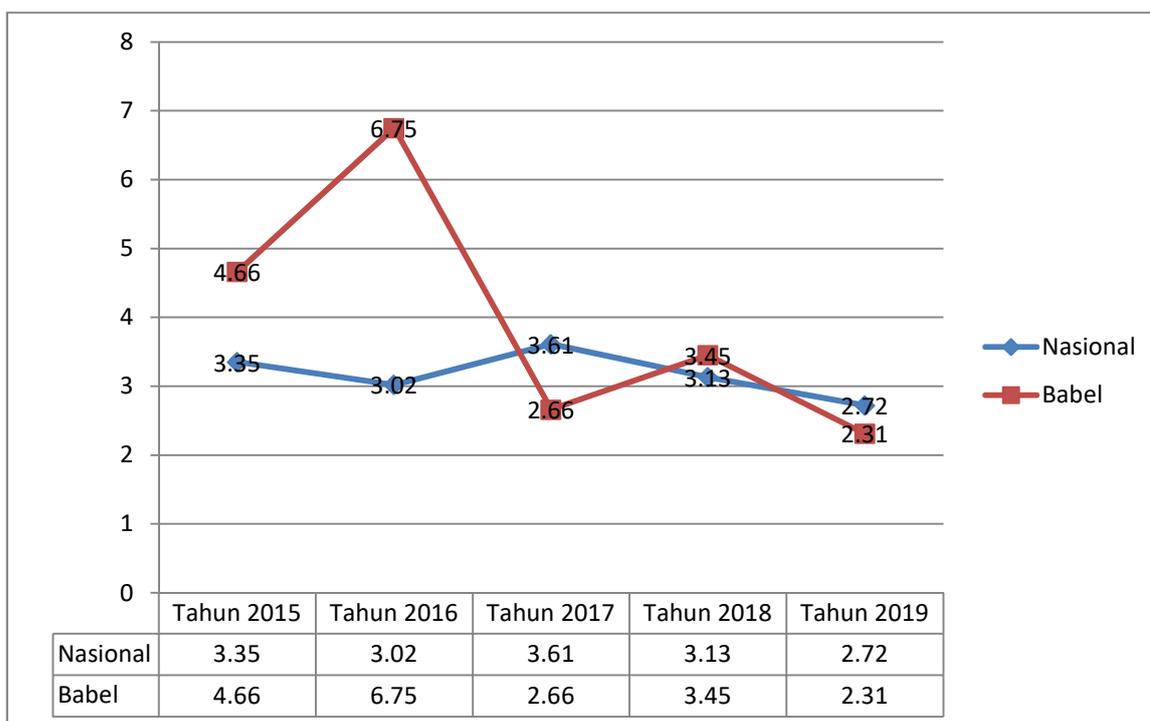
Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya.

b. Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2019 menunjukkan adanya penurunan. Pada Desember 2019 terjadi inflasi sebesar 0,38 persen. tingkat inflasi tahun kalender 2019 sebesar 2,31 persen. Dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari Tahun 2015 – 2019 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 1.6

Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2019 (Januari-Desember) telah terjadi inflasi sebesar 2,31 persen setelah tahun sebelumnya (Januari-Desember) 2018 juga mengalami inflasi sebesar 3,45 persen. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2019, seluruh kelompok pengeluaran memberikan sumbangan/andil inflasi, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,86 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

sebesar 0,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,07 persen; kelompok sandang sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,12 persen; serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen.

Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan/andil inflasi dominan selama tahun 2019 diantaranya adalah angkutan udara, bawang merah, cumi-cumi, tarif sekolah menengah pertama, ikan bakar, ikan singkur, air kemasan, rokok kretek filter, mie, cabai merah, rokok putih, bawang putih, cabai rawit, ikan tenggiri dan beras.

#### 4. Transportasi

##### a) Transportasi Darat

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jalan sebagai infrastruktur dasar harus diperhatikan baik kondisi maupun penggunaannya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan negara dan 850,99 km dengan status jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar sudah memiliki jalan yang ber kondisikan baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian, masih ada jalan yang memiliki kondisi rusak berat, seperti terlihat pada Grafik 1 yaitu sebesar 3,79 persen, dimana kondisi jalan yang mengalami kerusakan ada pada jalan dengan status jalan provinsi (54,86 km) yaitu jalan umum yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Selain itu, jalan negara yang menghubungkan jalan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional sepanjang 0,16 km juga mengalami kondisi rusak berat. Jika dilihat dari persentase, kondisi jalan pada tahun 2018 dengan kondisi jalan baik sebesar 64,69 persen (938,90 km) dan jalan sedang sebesar 25,56 persen (371,02 km). Terlihat bahwa kondisi jalan rusak ringan 5,96 persen (86,48 km) dan rusak berat sebesar 3,79 persen (55,02 km).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh dalam menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Terdapat panjang jembatan sebesar 3.037,61 meter dengan status milik provinsi dan 2.834,35 meter dengan status milik negara dimana konstruksi jembatan tersebut didominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan tahan lama.

Kondisi jalan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu penunjang terhadap jumlah kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda dua dan roda empat berfungsi sebagai mobilitas penumpang maupun barang dalam suatu daerah. Proses mobilisasi yang lancar dapat menjadi salah satu sarana penunjang perekonomian suatu wilayah.

Kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2018 tercatat sebesar 330.452 buah, angka ini mengalami penurunan 2,37 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 338.475 buah. Sedangkan Bus/Mini Bus menjadi moda transportasi kendaraan roda terakhir dari enam jenis kendaraan yang digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 696, menurun sebesar 6,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

#### b) Transportasi Laut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang berbentuk kepulauan sehingga aktifitas perhubungan penduduk secara ekonomi maupun nonekonomi mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi pada lalu lintas perhubungan laut. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran aktivitas transportasi ini. Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pelabuhan di setiap kabupaten dan kota.

Pelabuhan yang terbesar dan tersibuk adalah di Pangkal Balam yang terletak di Kota Pangkalpinang sedangkan pelabuhan yang terkecil adalah pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah. Jika dilihat dari aktivitas bongkar muatnya periode tahun 2018, pelabuhan dengan aktifitas bongkar muat terbesar adalah pelabuhan di Kota Pangkalpinang yaitu pelabuhan

Pangkalbalam sebesar 2.934.005,87 ton. Sedangkan aktifitas bongkar muat terkecil adalah pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 91.218 ton.

Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 juga masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri sebanyak 11.081 unit dengan berat kapal total adalah 8.798.920 gross ton, yang di dalamnya terdapat Pelayaran Rakyat dan Perintis. Sedangkan untuk pelayaran luar negeri sebanyak 429 kapal dengan berat 574.207 gross ton. Terjadi peningkatan kunjungan kapal dari luar negeri jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan kapal tersebut, paling banyak adalah mengunjungi pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang dengan jumlah 3.551 kunjungan kapal pelayaran dalam negeri dan 334 kunjungan kapal pelayaran luar negeri.

Diikuti oleh pelabuhan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat, dengan jumlah 3.025 kunjungan kapal pelayaran dalam negeri. Sedangkan pelabuhan lainnya yang juga memiliki kunjungan kapal yang cukup tinggi adalah pelabuhan Manggar dan Dendang di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 2.212 kunjungan kapal pelayaran dalam negeri dan 55 kunjungan kapal pelayaran luar negeri. Pelabuhan yang menempati tempat keempat kunjungan kapal tertinggi adalah pelabuhan Belitung dengan jumlah kunjungan kapal dalam negeri sebanyak 862 kunjungan dan kapal luar negeri sebanyak 18 kunjungan.

Arus penumpang yang datang dan berangkat dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana transportasi laut sebanyak 329.178 orang, dengan terbanyak melalui pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat yaitu sebesar 207.410 orang atau sebesar 62,91 persen terhadap total arus penumpang kapal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan jumlah penumpang berangkat dan datang masing-masing sebanyak 101.470 orang dan 105.940 orang.

Hal ini dikarenakan memang pelabuhan tersebut merupakan penghubung antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan atau dapat dikatakan penghubung antara Pulau Bangka

dengan provinsi lainnya di Sumatera. Diikuti oleh Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang dengan jumlah penumpang sebanyak 64.389 orang atau 19,53 persen terhadap total arus penumpang, dengan jumlah penumpang berangkat dan datang masing-masing sebanyak 32.706 orang dan 31.683 orang.

Pelabuhan ini mengangkut penumpang dengan jalur terbanyak yaitu ke Pulau Belitung dan Pulau Jawa khususnya Pelabuhan Tanjung Priuk dan Sunda Kelapa. Untuk jumlah arus penumpang paling sedikit adalah Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka yaitu sebanyak 6.172 orang atau 1,87 persen dari total jumlah penumpang. Sedangkan sisanya sebesar 15,69 persen arus penumpang pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jumlah penumpang yang berangkat dan datang melalui Pelabuhan Tanjungpandan di Kabupaten Belitung yaitu sebanyak 51.747 orang adanya penurunan jumlah penumpang baik yang berangkat maupun yang datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 – 2017. Sebaliknya, terjadi peningkatan jumlah penumpang pada 2018 dibanding tahun 2017, dengan peningkatan sebesar 22,50 persen pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana salah satunya adalah mulai naiknya harga tiket pesawat terbang pada beberapa bulan terakhir di tahun 2018 sehingga kebanyakan penumpang beralih moda transportasi menjadi transportasi laut untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Sementara itu, arus barang yang terjadi di pelabuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat ramai. Beberapa merupakan barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar provinsi maupun antar pulau dan beberapa merupakan komoditas ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Data dari ke 8 (delapan) pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2018 jumlah barang yang dimuat lebih besar dibandingkan barang yang dibongkar, yaitu masing-masing sebesar 7.366.796,45 ton untuk barang yang dimuat dan 2.746.416,85 ton untuk barang yang dibongkar.

Hal ini berarti barang yang dimuat bobotnya hampir tiga kali lipat dibandingkan barang yang dibongkar. Dengan beranggapan bahwa sebagian besar barang yang dibongkar merupakan kegiatan impor dan barang yang dimuat merupakan kegiatan ekspor maka dapat disimpulkan bahwa nilai

ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih besar dibandingkan nilai impor. Hal ini sesuai dengan nilai neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yang mengalami surplus. bahwa pelabuhan Belinyu, Tanjung Kalian, Toboali, Manggar dan Dendang memiliki kegiatan memuat barang lebih besar dibandingkan membongkar barang. Sedangkan Pelabuhan Pangkalbalam, Sungai Selan, dan Tanjungpandan memiliki kegiatan memuat barang lebih kecil dibandingkan membongkar barang.

Jika dilihat persentase bongkar muat barang pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat bahwa Pelabuhan Manggar dan Dendang di Kabupaten Belitung Timur memiliki kegiatan bongkar muat barang tertinggi yaitu sebesar 5.397.839 ton atau 53,37 persen dari total kegiatan bongkar muat barang, dimana untuk kegiatan bongkar sebesar 72.722 ton dan 5.325.117 ton untuk kegiatan muat. Kemudian diikuti Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang dengan masing-masing bongkar muat barang sebesar 1.837.297,39 ton dan 1.096.708,48 ton. Khusus pelabuhan ini, memiliki banyak kegiatan bongkar dengan komoditas kebutuhan hidup sehari-hari, pupuk, dan bahan bangunan seperti semen, batu split.

Sementara itu, Pelabuhan yang memiliki kegiatan bongkar muat barang terkecil adalah Pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebesar 91.218 ton atau 0,90 persen kegiatan bongkar muat barang. Pelabuhan dengan volume bongkar muat yang tidak jauh berbeda dengan Pelabuhan Sungai Selan adalah Pelabuhan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat sebesar 114.512,43 ton atau 1,13 persen kegiatan bongkar muat barang, yang terdiri dari 56.306,46 ton kegiatan bongkar dan 58.205,97 ton kegiatan muat barang. Sedangkan sisanya sebesar 15,59 persen kegiatan bongkar muat barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jumlah kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjungpandan di Kabupaten Belitung, Pelabuhan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan, dan Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka yaitu sebanyak 1.575.638 ton kegiatan bongkar muat barang.

c) Transportasi Darat

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, permintaan akan jasa transportasi udara semakin meningkat apalagi harga tiket untuk penerbangan dalam beberapa tahun terakhir juga sangat kompetitif, terlebih jika dikaitkan aspek kenyamanan dan kebutuhan akan waktu tempuh yang singkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 bandar udara yaitu Bandar Udara Depati Amir yang berada di Pulau Bangka dan Bandar Udara H AS Hanandjoeddin di Pulau Belitung.

Pada tahun 2018 frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di dua bandar udara terlihat bahwa yang lebih ramai adalah di Bandar Udara Depati Amir, yakni kedatangan pesawat dan keberangkatan pesawat total setahun masing-masing sebanyak 8.584 pesawat dan 8.576 pesawat, dimana untuk kedatangan dan keberangkatan pesawat dari beberapa maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air, Lion Air, dan Wings Abadi Airlines. Sedangkan di Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin, frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat dalam tahun 2018 berjumlah sama yakni masing-masing sebanyak 4.797 pesawat, dimana untuk kedatangan dan keberangkatan sudah cukup variatif jenis maskapainya sama seperti halnya di Bandara Depati Amir.

Arus penumpang yang ada di bandar udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup ramai, yaitu terjadi di Bandar Udara Depati Amir dengan masing-masing kedatangan dan keberangkatan penumpang rata-rata sebesar 89.182 orang dan 84.968 orang per bulannya. Begitupun dengan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin, dengan penerbangan yang hanya setengah dari Bandar Udara Depati Amir, memiliki rata-rata jumlah penumpang yang datang dan berangkat masing-masing sebanyak 43.600 orang dan 43.561 orang per bulannya.

Pergerakan arus penumpang yang paling ramai di Bandar Udara Depati Amir dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin pada bulan Juni 2018 yang dikarenakan pada bulan tersebut bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran dan Libur Sekolah, sehingga arus penumpang baik yang berangkat maupun yang datang meningkat karena tradisi “pulang kampung” atau silaturahmi, dan pada bulan ini harga tiket pesawat juga belum melambung

tinggi. Sarana transportasi udara selain menjadi angkutan penumpang juga merupakan angkutan barang, biasanya adalah barang bawaan atau barang usaha yang dibawa oleh penumpang. Pada tahun 2018, jumlah barang yang dibongkar dan dimuat melalui Bandar Udara Depati Amir lebih besar dibandingkan jumlah barang yang dibongkar dan dimuat pada Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin.

## 5. Geografi dan Iklim

Kepulauan Bangka Belitung terbentang pada 0°50'LS-4°10'LS sehingga iklim tropis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki bulan basah dan kering. Saat musim penghujan (bulan basah), beberapa daerah tergenang air. Apalagi, sekitar 40 persen desa/kelurahan terletak di tepi Laut. sebaliknya saat kemarau banyak sumur warga kehabisan air.

Namun, sering terjadi juga hujan dan panas bergantian dalam kurun waktu berdekatan. Hal ini tak lepas dari Luas wilayah lautan (65.301 km<sup>2</sup>). Suhu Udara cenderung panas dengan rata-rata selama tahun 2018 mencapai 27°C di Pangkalpinang dan 26,5°C di Tanjung Pandan.

Adapun kelembapan udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergolong baik untuk kesehatan dan pertanian. Pada tahun 2018, Kelembapan udara berkisar antara 51 persen sampai dengan 100 persen. Sementara tekanan udara antara 1.007,5 mb sampai dengan 1.014,3 mb.

Aneka Flora dan Fauna dapat dijumpai didaratan maupun dilautan. Namun lahan kritis mengancam kehidupan hewan liar seperti Buaya, biawak, ular, babi hutan dan sebagainya. Pada 2018, luas lahan kritis dalam kawasan hutan tercatat 216.108,66 hektar.

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu pulau bangka dan belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, burung, Lepar pongok, Gelasa, panjang dan Tujuh. sedangkan Pulau belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki kandungan alumunium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dll. Keadaan tanah terdiri dari *Podsolik dan Litosol, Asosiasi Podsolik, Asosiasi Aluvial, Hedromotif dan Clay Humus serta regosol.*

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan semi tertutup. perairan terbuka yang terdapat di Sekitar pulau bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan selatan pulau bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu Perairan di Pulau belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Selain sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti : Sungai Baturusa, Buluh, Kotawaringin, Kampa, Layang, Manise dan sungai kurau di pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang dan Sungai Sembulu.

Alam Kepulauan Bangka Belitung ditumbuhi bermacam-macam jenis kayu berkualitas yang diperdagangan ke luar daerah seperti: Kayu meranti, Ramin, Membalong, Mandaru Bulin dan Kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah Kapuk, jelutung, Pulai, Gelam Meranti Rawa, Mentagor, Mahang, Bakau dan lain-lain. hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan terutama madu alam dan rotan. Madu Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan madu pahit.

Fauna di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di Kepulauan Riau dan semenanjung malaysia daripada dengan daerah sumatera. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung antara lain : Rusa, Beruk, monyet, Lutung, babi, tringgiling, kancil, musang, elang, ayam hutan, Pelanduk, Berjenis-jenis ular dan biawak.

pada tahun 2018, di wilayah Pangkalpinang arah angin rata-rata pada bulan Desember hingga April umumnya dari arah barat sedangkan untuk bulan mei sampai November didominasi oleh angin timuran (Timur sampai dengan selatan). Arah angin ini sangat berpengaruh terhadap tangkapan ikan nelayan. Saat

tangkapan berkurang harga ikan pun melambung. Arah angin juga berpengaruh terhadap transportasi penyeberangan. Saat gelombang besar, angkutan penyeberangan berhenti beroperasi.

Gambar 1.7  
Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014- 2034

Tabel 1.2  
Luas Lahan (Ha)

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
<b>I. LAHAN PERTANIAN</b>	<b>1.186.652</b>
I.1. Lahan Sawah	22.771
a. Irigasi	4.602
b. Tadah hujan	16.397
c. Pasang surut	270
d. Lebak	1.502
I.2. Lahan Bukan Sawah	1.163.881
a. Tegall	117.376
b. Ladang	28.147
c. Perkebunan	367.848
d. Hutan rakyat	42.637
e. Pengembalaan	2.263
f. Sementara tidak diusahakan	67.415
g. Lain-lain	538.195

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
<b>II. LAHAN BUKAN PERTANIAN</b>	
a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	455.762
<b>JUMLAH</b>	<b>1.642.414</b>

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Gambar 1.8  
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014- 2034

## 6. Kondisi Sosial Budaya

### a) Pendidikan

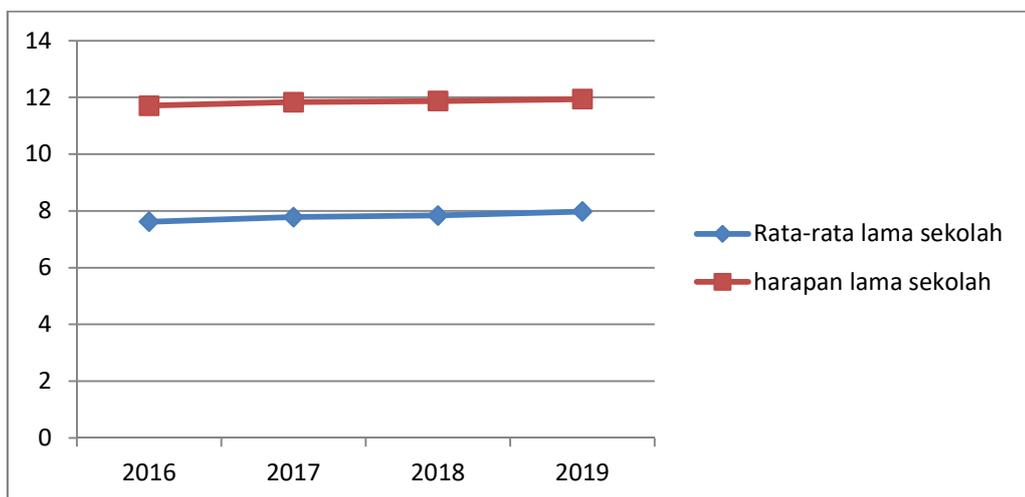
Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah dormal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Sementara Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya pendidikan formal yang pernah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Pada tahun 2010, anak yang berusia 7 tahun memiki harapan dapat menikmati pendidikan selama 10,48 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas XI Sekolah Menengah Atas. Sementara itu, penduduk 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,07 tahun, atau setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas

VII Sekolah Menengah Pertama. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada 2019, Penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah selama 11,94 tahun, atau hamper setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas juga mengalami peningkatan menjadi 7,98 tahun atau setara dengan masa pendidikan dikelas VIII Sekolah Menengah Pertama.

Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,46 persen pertahun, dan rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,36 persen per tahun. Pendidikan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, Usaha yang lebih keras dan berkesinambungan mutlak diperlakukan, mengingat angka HLS dan RLS di Kepulauan Bangka Belitung masih cukup jauh di bawah angka nasional. Berikut perkembangan

Gambar 1.9

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah



Sumber :IPM Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2019

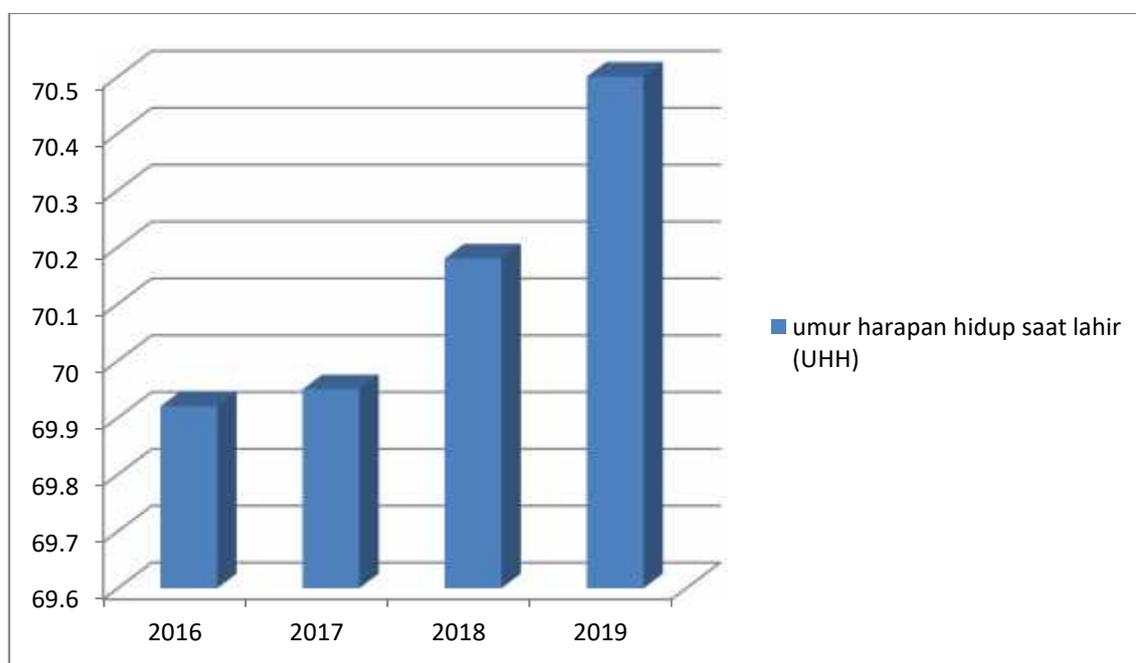
b) Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Umur Harapan Hidup adalah umur yang diharapkan dapat dicapai oleh

bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Selama periode 2010 hingga 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir bertambah 1,35 tahun atau sekitar 16 bulan 6 hari. Secara rata-rata, Umur Harapan Hidup bertambah 0,22 persen setiap tahunnya. Bayi yang lahir pada tahun 2010 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 69,15 tahun atau sekitar 69 tahun 1 bulan 24 hari. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun, ikut berpengaruh meningkatnya harapan hidup bayi yang baru lahir pada tahun 2019, menjadi 70,50 tahun atau sekitar 70 tahun 6 bulan. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.10

## Umur Harapan Hidup (UHH)



## 7. Kondisi Pemerintahan

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, maka telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. ISU STRATEGIS DAERAH**

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategi yang sedang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
2. Kemandirian Pangan Rendah.
3. Pengendalian inflasi.
4. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah.
5. Tingkat Investasi rendah.
6. Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik.
7. Kualitas Infrastruktur dan konektivitas masih terbatas.
8. Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
9. Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
10. Reformasi Birokrasi dan pelayanan public belum optimal.
11. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif.
12. Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup.
13. Penanggulangan bencana

Permasalahan daerah yang dianggap prioriras utama :

**Prioritas I : Pengembangan Pembangunan Agropolitan**

Sasaran pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, dengan arah kebijakan :

1. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
3. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.
4. Pembinaan hubungan industry sektor pertanian.
5. Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.
6. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.
8. Pengembangan Kawasan Strategis.

**Proritas 2 : Pengembangan Pariwisata**

Sasaran Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
2. Peningkatan infrastruktur, saran dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
3. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya sainng kepariwisataan daerah.
4. Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
5. Pembinaan hubungan industry dan kesehatan kerja disektor pariwisata.
6. Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.

7. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
8. Pengembangan kawasan strategis pelabuhan.
9. Pengembangan kawasan peruntukan wisata.
10. Pengembangan konektivitas.

### **Prioritas 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Sasaran menurunnya angka pengangguran memiliki arah kebijakan :

1. Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja.
2. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan.

Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan arah kebijakan antara lain :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin.

Sasaran menurunnya angka inflasi arah kebijakannya antara lain :

1. Pengendalian tingkat harga-harga komoditas penyumbang *inflasi*.
2. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

Sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

### **Prioritas 4 : Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan**

Sasaran Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah memiliki arah kebijakan :

1. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern.
2. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku.

Sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat.
2. Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis provinsi
3. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan.
2. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana penduduk terminal.
3. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.

#### **Prioritas 5 : Pembangunan berdemokrasi**

Sasaran peningkatan pembangunan berdemokrasi memiliki arah kebijakan :

1. Peningkatan pemberian kesempatan kebebasan sipil kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas).
3. Peningkatan pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat.
4. Peningkatan pemberdayaan Lembaga-lembaga Demokrasi.

### **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan lakip, gambaran umum kondisi daerah , kedudukan , tugas pokok, wewenang dan kewajiban gubernur, isu strategis daerah , dan sistematika penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menegaskan kembali secara singkat melalui matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang telah direvisi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 di tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

Dalam Bab ini menjelaskan :

- A. Capaian kinerja pemerintah daerah berupa, perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2019 dan tahun sebelumnya, pengukuran pencapaian kinerja, analisis pengukuran pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, evaluasi akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran. Pada bab ini diukur dan dianalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019, apakah mengalami kenaikan/penurunan capaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum dari pencapaian kinerja tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

##### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: *"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"*. Pernyataan visi ini mengandung enam makna yaitu :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat Pendapatan Masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Efisien dan Cepat* dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government*

(TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. *Teknologi* dimaknaidengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu :

1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, Pernyataan misi ini mengandung makna:
  - a. pembangunan ekonomi adalah pembagunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
  - b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industry pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.
2. Mewujudkan Infrastruktur dan Konektivitas daerah yang berkualitas; pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. Infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
  - b. konektivitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat;  
Pernyataan misi ini mengandung makna kesehatan masyarakat adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
  - b. pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
6. Meningkatnya pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
  - b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan misi masing-masing.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005-2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; RPJMD Nasional 2015-2019; visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih; RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, Isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012-2017), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
4. Meningkatnya pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas
7. Terwujudnya pembangunan demokrasi
8. Meningkatnya tata kelola kebencanaan
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Untuk mencapai ke 9 (Sembilan) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian,peternakan,perburuan dan jasa pertanian
2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan
4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan
5. Meningkatnya produksi sektor perindustrian.
6. Terwujudnya kemandirian energi
7. Meningkatnya kemandirian fiskal
8. Menurunnya pengangguran
9. Menurunnya kemiskinan
10. Menurunnya inflasi
11. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
12. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
13. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
15. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang baik
16. Meningkatnya aspek kebebasan sipil
17. Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat
18. Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi
19. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana
20. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target, target capaian selama 5 tahun (2017-2022), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indicator tujuan dan indicator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut :

1) Misi I:

Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah,yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan :
  - a. Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
    - Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan indikator kinerja sasaran persentase Pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
    - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
    - Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja sasaran jumlah kunjungan wisatawan dan persentase peningkatan jumlah wisatawan.
    - Meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
    - Meningkatnya produksi sektor perindustrian dengan indicator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan produksi sektor industry pengolahan
    - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran rasio elektrifitas
  2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
    - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal dengan indicator kinerja sasaran rasio Pendapatan Asli (PAD) terhadap APBD
    - b. Pendapatan Perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
      - Menurunnya pengangguran dengan indikator kinerja sasaran persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

- Menurunnya kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran persentase Penduduk Miskin
- Menurunnya inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi
- Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja sasaran persentase laju pertumbuhan penduduk

2) Misi II:

Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan persentase pertumbuhan subsector jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
  - Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan
  - Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi
  - Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps

3) Misi III:

Meningkatnya Sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan meningkatnya lama sekolah masyarakat dengan indicator tujuan Rata-rata lama sekolah, yang diintervensi dengan sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

4) Misi IV:

Meningkatnya kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indicator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Harapan Hidup, Angka kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Stunting

## 5) Misi V :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkualitas dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
    - Opini Audit BPKK atas Laporan Keuangan
    - Indeks Reformasi Birokrasi
  - b. Meningkatnya aspek kebebasan Sipil dengan indikator kinerja sasaran skor aspek kebebasan sipil;
  - c. Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat dengan indikator kinerja sasaran skor aspek hak-hak politik;
  - d. Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi dengan indikator kinerja sasaran skor aspek lembaga demokrasi.

## 6) Misi VI :

Meningkatkan Pengendalian Bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut
  - Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indicator kinerja sasaran Indeks Kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelolalingkungan hidup dengan indicator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
  - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja sasaran beserta target selama 5 tahun digambarkan seperti pada Tabel V.1 berikut ini

Tabel V.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Sasaran  
RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)
					Persentase peningkatan jumlah wisatawan
			4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi			
	Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat	Pengeluaran Pemerintah Perkapita	7.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD
		Pendapatan Perkapita	8.	Menurunnya	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

				pengangguran	
			9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
			10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi
			11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	pertumbuhan sub sektor jasa konstruksi	12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan
					Persentase kabupaten/kota yang telahterkonektiviti
					Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps
4	Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia arapan Hidup	14.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
					Angka Kematian Ibu
					Angka Kematian Bayi
					Angka Stunting

6	Terwujudnya Reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	15.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
					Indeks Reformasi Birokrasi
7	Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokras Indonesia Provinsi	16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil
			17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik
			18.	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah
9	Meningkatnya tat kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(ILKH)	20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

## 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, selanjutnya untuk memperjelas capaian tujuan dan sasaran dimaksud maka disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun 2017 – 2022.

Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan, sasaran strategis dan yang diimplementasikan kedalam perjanjian kinerja. Adapun gambaran sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

## Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ dengan Y: Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan. X <sub>t</sub> : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun ini X <sub>t-1</sub> : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun lalu
2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan. X <sub>t</sub> : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun ini X <sub>t-1</sub> : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun lalu
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	Jumlah orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan.
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun ini dikurangi jumlah wisatawan tahun lalu dibagi jumlah wisatawan tahun lalu dikali 100%
4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian X <sub>t</sub> : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun ini X <sub>t-1</sub> : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun lalu
5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$

			<p>dengan</p> <p>Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan</p> <p>X<sub>t</sub> : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun ini</p> <p>X<sub>t-1</sub> : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun lalu</p>
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	$Y = \frac{\text{Jumlah pelanggan}}{\text{Jumlah rmah tangga}} \times 100\%$
7.	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD	Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total APBD
8.	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlahangkatan kerja yang ada.</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p><i>Headcount Index</i> (HCI - P<sub>0</sub>) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. <i>Headcount index</i> secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <p>P<sub>0</sub> = Persentase penduduk miskin (h)</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran perkapit: penduduk yang berada di bawah (i = 1, 2, 3, ..., q); y<sub>i</sub> &lt; z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang bera di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>
10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan</p>

			<p>penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumus</p> $INF_n = \frac{(IHK_n - IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>INF<sub>n</sub> : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)</p> <p>IHK<sub>n</sub> : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)</p> <p>IHK<sub>n-1</sub> : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)</p>
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	<p>Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Rumus:</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Metode Geometri</p> <p>r : laju pertumbuhan penduduk</p> <p>P<sub>t</sub> : jumlah penduduk pada tahun t</p> <p>P<sub>0</sub> : jumlah penduduk pada tahun awal</p> <p>t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p>
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	jumlah ketersediaan angkutan dibagi jumlah penduduk
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	$\frac{\text{jlh jaringan jalan provinsi (km)}}{\text{jumlah kab/kota}} \times 100\%$
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	$\frac{\text{Jumlah Desa dg konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps}}{\text{Jumlah Desa.....}} \times 100$
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:</p> <p>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> <p>E<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p>

			$i = \text{Usia } (a, a+1, \dots, n)$
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<p>Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk})$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun  Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>Masih sekolah di SD sampai dengan ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>Masih sekolah di S2/S3 = konversi</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tamat di konversi ijazah terakhir</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di konversi ijazah terakhir</li> </ol>
14.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu
		Angka Kematian Ibu	<p>Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</p> <p>.....X 100.000</p> <p>Jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu selama 1 tahun</p>
		Angka Kematian Bayi	<p><math>AKB = \frac{D_{0-1 \text{ th}}}{\Sigma \text{ lahir hidup}} \times 1000</math></p> <p>Dimana :</p> <p><math>D_{0-1 \text{ th}}</math> = jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu</p> <p><math>\Sigma \text{ lahir hidup}</math> = jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</p>
		Angka Stunting	<p>Angka Stunting = <math>(\frac{\Sigma \text{Balita sangat pendek}}{\Sigma \text{Balita}}) \times 100\% + (\frac{\Sigma \text{Balita pendek}}{\Sigma \text{Balita}}) \times 100\%</math></p>
15.	Meningkatnya Tata kelolapemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Nilai Indeks yang dikeluarkan oleh KEMENPAN-RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi
16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Nilai skor aspek kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan

			berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi
17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Nilai skor aspek hak-hak politik Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
18.	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Nilai skor aspek lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen
19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	$C = V \times H/R$ $R = H \times V/C$ R= Risiko V= vulnerability (kerentanan) H= Hazard (bahaya) C= Kapasitas (kemampuan) Risiko (kerugian) berbanding lurus dengan besarnya ancaman (bahaya) dan kerentanan Kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan (kapasitas)
20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH \text{ Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKLH = indeks kualitas Lingkungan Hidup IKA =Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap

satuan kerja perangkat daerah. Adapun rincian mengenai Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90
2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,85
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	389.009
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,16
4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,57
5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,65
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	100
7.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD	0,29
8.	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60
9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,15
10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,31
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,10
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	0,60
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,40
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,89
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,83
14.	Meningkatnya derajat	Angka Harapan Hidup	70,16

	kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	22
		Angka Kematian Bayi	7.180
		Angka Stunting	28
15.	Meningkatnya Tata kelolapemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,39
16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76
17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,76
18.	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33
19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,20
20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,96

#### D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perlu upaya untuk pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam program prioritas daerah. Adapun program prioritas masing-masing untuk mencapai sasaran 2019 sebagai berikut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA		ANGGARAN
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	1	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	627.902.000,00
			2	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	3.976.711.500,00
			3	Program Pengembangan Perkebunan	7.867.062.000,00
			4	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.878.432.750,00
			5	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	353.411.000,00
			6	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	1.474.491.000,00

			7	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	9.572.022.000,00
			8	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	150.020.000,00
					<b>26.900.052.250,00</b>
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	1	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	2.173.334.000,00
			2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.030.083.240,00
			3	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	2.311.290.000,00
			4	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.127.719.000,00
			5	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	821.903.000,00
			6	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	2.432.624.000,00

			7	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	2.531.025.000,00
					<b>18.427.978.240,00</b>
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	1	Program Pelestarian Budaya	5.500.543.500,00
			2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.259.870.000,00
			3	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	6.209.583.650
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	3.357.413.000
			5	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1.218.276.500,00
			6	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1.205.219.500,00
			7	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	2.784.850.000,00
			8	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.819.903.000,00

					<b>27.355.659.150,00</b>
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	1	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	141.003.000,00
			2	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	252.460.000,00
					<b>393.463.000,00</b>
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1	Program Pengembang Wilayah dan Pengawasan Industri	114.060.000,00
			2	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	2.808.198.300,00
					<b>2.922.258.300,00</b>
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	1	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	303.075.000
					<b>303.075.000</b>
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Rasip Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	6.982.981.000,00
			2	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	124.399.250,00

			3	Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	916.504.370,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	1.819.700.000,00
					<b>9.843.584.620,00</b>
8	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	72.375.000,00
			2	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	62.580.000,00
			3	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	31.650.000,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	3.665.600.000,00
			5	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	59.450.000,00
			6	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	829.841.754,00
			7	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	613.030.000,00

			8	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	553.680.000,00
			9	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	749.802.000,00
			10	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	2.660.073.500,00
					<b>9.298.082.254,00</b>
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Kemiskinan	1	Program Pemberdayaan Sosial	823.950.000,00
			2	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	1.122.060.000,00
			3	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	1.440.820.000,00
			4	Program Rehabilitasi Sosial	1.111.678.000,00
			5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.188.290.000,00
			6	Program Penanganan Fakir Miskin	408.200.000,00
			7	Program Pembangunan Perumahan Rakyat	9.150.433.000,00
			8	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	12.771.020.000,00

			9	Program Pelayanan Kesehatan	20.651.677.648,00
					<b>48.668.128.648,00</b>
10.	Menurunnya angka Inflasi	Angka Inflasi	1	Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	830.858.000,00
			2	Program Pengembangan Perdagangan	1.033.662.000,00
			3	Program Peningkatan Pelindungan Konsumen dan Kemetrolagian	235.155.000,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1.687.769.000,00
					<b>3.787.444.000,00</b>
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	1	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	1.914.966.000,00
					<b>1.914.966.000,00</b>
12	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	1	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1.431.917.785
					<b>1.431.917.785</b>

		Rasio Ketersediaan transportasi layak jalan	1	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	2.112.837.125,00
			2	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	2.935.545.001,00
			3	Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	7.969.467.329,00
					<b>16.191.874.118,00</b>
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	1	Program Kebinamargaan	277.332.478.300,00
			2	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.335.028.000,00
					<b>278.667.506.300,00</b>
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	29.194.004.500,00
			2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	44.836.815.424,00
			3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5.902.154.500,00

			4	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	2.615.988.343,00
					<b>82.548.962.767,00</b>
		Rata rata lama sekolah	1	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	94.786.811.800,00
			2	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	36.315.130.000,00
			3	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	14.278.763.000,00
			4	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	34.415.382.700,00
			5	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	23.494.749.500,00
			6	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	7.707.548.000,00
			7	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	276.370.000,00

			8	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	112.861.350,00
					<b>211.387.616.350,00</b>
14	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1	Program Kesehatan Masyarakat	7.197.204.300,00
			2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.998.497.60,00
			3	Program Pelayanan Kesehatan	20.651.677.648,00
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	2.301.079.120,00
			5	Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	916.504.370,00
					<b>33.064.963.038,00</b>
		Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	1	Program Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penurunan kematian Ibu	668.490.000,00
					<b>668.490.000,00</b>
		Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2	Program Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi	465.240.700,00
					<b>465.240.700,00</b>
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	3	Program Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gizi Anak dan keluarga	1.004.640.000,00

		(%)			
					<b>1.004.640.000,00</b>
15	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	1.101.363.800,00
			2	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	411.443.000,00
			3	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	1.150.234.200,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	298.132.000,00
					<b>2.961.173.000,00</b>
		Indeks Reformasi Birokrasi	1	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	35.114.300,00
			2	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	4.245.293.750,00
			3	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	50.134.750,00
			4	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	2.199.744.000,00

			5	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100.791.000,00
			6	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90.010.000,00
			7	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	216.365.700,00
			8	Program Penelitian dan Pengembangan	1.383.921.500,00
			9	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	63.600.000,00
			10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	794.134.800,00
			11	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	170.010.000,00
			12	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	212.950.000,00
			13	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	337.950.000,00
			14	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	1.343.004.400,00
			15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	270.253.400,00

			16	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	1.881.795.725,00
			17	Program Pengembangan Otonomi Daerah	789.217.500,00
			18	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	687.660.850,00
			19	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	10.189.781.244,00
			20	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	948.782.250,00
			21	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	95.290.000,00
			22	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	1.490.792.000,00
			23	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6.737.500,00
			24	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	473.475.000,00
			25	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	1.386.882.050,00
			26	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	204.067.750,00

			27	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	1.367.840.750,00
			28	Program Peningkatan Dan pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	226.873.500,00
			29	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	1.281.608.450,00
			30	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi Promosi, dan kepangkatan	1.902.015.000,00
			31	Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	5.205.277.000,00
			32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	7.486.508.400,00
			33	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	6.723.552.480,00
			34	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1.431.917.785,00
			35	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	1.074.069.500,00

			36	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.121.384.000,00
			37	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.957.187.500,00
			38	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	951.262.950,00
			39	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	281.266.000,00
					<b>60.678.522.784,00</b>
16	Meningkatnya Kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	1	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1.618.009.000,00
			2	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan	210.806.800,00
			3	Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	245.256.000,00
			4	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.334.920.500,00
			5	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	433.726.000,00
					<b>3.842.718.300,00</b>

17	meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	1	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	669.980.000,00
			2	Program Penegakan Perda dan Perkada	161.065.000,00
					<b>831.045.000,00</b>
18	meningkatnya aspek lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	1	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	212.898.000,00
					<b>212.898.000,00</b>
19	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	2.385.749.000,00
			2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	401.193.500,00
			3	Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana	3.152.720.000,00
			4	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1.112.662.500,00
					<b>7.052.325.000,00</b>
20	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Peningkatan Pengendalian dan Petaatan Lingkungan Hidup	412.579.000,00

			2	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.635.120.000,00
			3	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	5.575.534.750,00
			4	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	670.431.300,00
			5	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	2.079.635.096,00
			6	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	975.105.000,00
					<b>11.348.405.146,00</b>

Sumber: BAPPEDA 2020

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan dengan membandingkan target dan realisasi maka akan diketahui tercapai atau tidak tercapainya indikator yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan mendapatkan strategi yang tepat untuk kegagalan peningkatan kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2019

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	75% sampai 100%	Berhasil
3	55% sampai 75%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55%	Kurang Berhasil

Berdasarkan data yang disampaikan dari satuan kerja perangkat daerah, hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90	4,22	86,12
2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,85	8,11	210,64
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	389.009	438.373	112,68
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,16	0,13	81,25
4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,57	0,87	152,63
5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,65	1,17	44,15
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100	100	100
7.	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD	0,29	0,27	93,10
8.	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60	3,62	154,69
9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,15	4,50	114,44

10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,31	2,62	240,83
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09	1,98	105,55
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,10	0,10	100
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43	100
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,40		
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,89	11,87	99,83
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,83	7,98	101,91
14.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,16	70,50	100,48
		Angka Kematian Ibu	22	137,34	16,01
		Angka Kematian Bayi	7.180	7.172	100,11
		Angka Stunting	28	7,70	363,636
15.	Meningkatnya Tata kelola pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,39	65,39*	100
16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	87,76	100

17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,76	73,56	100
18.	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33	63,76	100
19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,20	0,24	120
20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,96	65,80	107,93

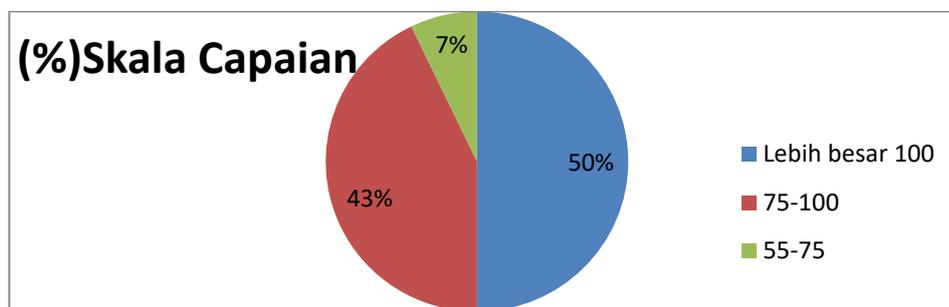
Ket :

\*) Data Tahun 2018

Berdasarkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah sebanyak 20 Sasaran dan 28 indikator kinerja sasaran, dengan rincian Pengukuran Capaian adalah sebanyak sebanyak 14 indikator kinerja sasaran dengan capaian **sangat berhasil**, 12 indikator kinerja sasaran dengan capaian **berhasil**, dan 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian **kurang berhasil**. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.1.

Perbandingan persentase skala pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan



## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target sasaran RPJMD tahun 2017-2022.

Pengukuran analisis capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada Tahun 2019 dengan capaian sebagai berikut :

a. Misi Pertama :

### **Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**

Tujuan 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Indikator Kinerja 1) : Persentase pertumbuhan PDRB.

Tabel 3.3  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	4,30	4,40	4,45	3,05	103,5	69,3

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran capaian, indikator kinerja Persentase pertumbuhan PDRB realisasi capaian tahun 2019 sebesar 3,05. Dari persentase capaian kinerja tujuan tersebut, dikategorikan “cukup berhasil”. namun bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 4,45 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018.

Tabel 3.4  
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	3,05	4,70	64,89

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 3,05, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,70 maka tingkat kemajuan telah mencapai 64,89 sehingga perlu meningkatkan kinerja sebesar 35,10%

Tabel 3.5.  
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

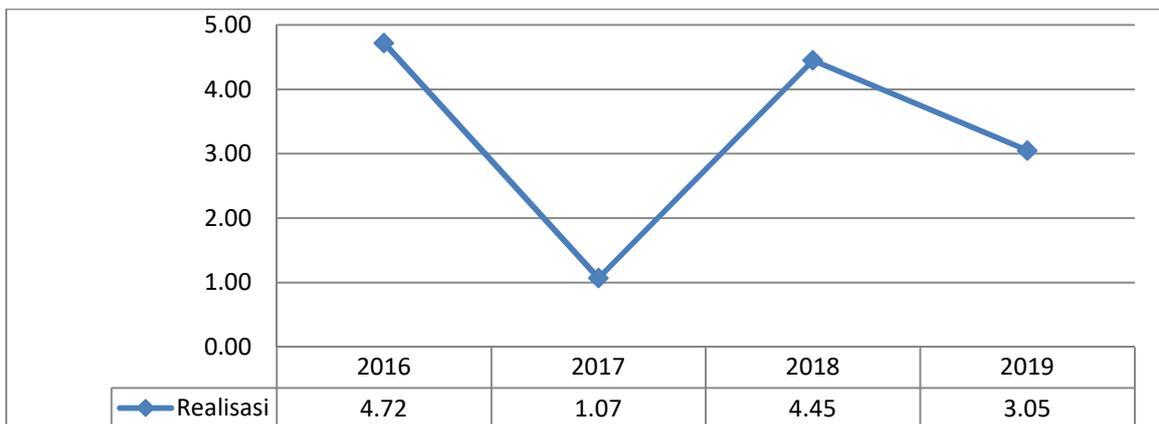
Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	3,05	8,00	- 4,95

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Perbandingan realisasi kinerja Persentase pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 3,05 masih dibawah target nasional yaitu 8,00 yaitu – 4,95.

Gambar 3.2

Perbandingan Target RPJMD dengan realisasi capaian



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan grafik diatas bahwa pada capaian indikator Persentase pertumbuhan PDRB pada tahun 2019 sebesar 3,05 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2018. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya konsumsi masyarakat dan investasi serta adanya kontraksi pada ekspor luar negeri serta adanya penurunan kinerja lapangan usaha utama.

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 tumbuh 3,05 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,45 persen. Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2019 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan (19,59 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,94 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,79 persen), Konstruksi (10,37 persen) serta Pertambangan dan Penggalian (9,49 persen).

Pada tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 13,78 persen; diikuti lapangan usaha Jasa

Lainnya serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,83 persen dan 10,19 persen.

Meskipun seluruh lapangan usaha yang ada dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif di tahun 2019, namun pada lapangan usaha yang kontribusinya besar, pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2018 yang lalu. Seperti pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,45.

Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 3 persen, namun pada tahun 2019 tumbuh melambat sebesar 2,89 persen. Pada lapangan usaha perkebunan yang merupakan salah satu kontributor terbesar lapangan usaha ini, rendahnya harga komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada pada tahun 2019 membuat produktivitas menurun.

Demikian juga dengan lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4 persen, namun pada 2019 tumbuh melambat sebesar 1,17 persen. Kendala aturan pemerintah membuat perusahaan smelter swasta yang ada di Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya. Pada tahun 2019, hanya beberapa perusahaan smelter swasta yang bisa berproduksi dan melakukan ekspor logam timah.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 0,61 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berasal dari pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,61 persen, diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing sebesar 0,53 persen dan 0,44 persen. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Bangka Belitung yang masih terus digencarkan ikut mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019.

Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 tumbuh 3,99 persen, meningkat dibanding Tahun 2018 yang tumbuh 3,71 persen. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pertumbuhan pada hampir seluruh lapangan usaha

kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Jasa Keuangan yang berkontraksi masing-masing sebesar 2,70 persen dan 0,52 persen.

Struktur PDRB Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2019 masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan sebesar 19,34 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,69 persen, Konstruksi sebesar 10,68 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,03 persen. Kelima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tumbuh positif kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi.

Peningkatan volume produksi logam timah dibandingkan tahun 2018 ikut mendorong peningkatan kinerja industri pengolahan. Jika pada tahun 2018 yang lalu hanya ada satu perusahaan smelter yang masih bisa melakukan ekspor, pada tahun 2019 ini sudah ada tambahan perusahaan smelter swasta yang bisa memproduksi dan melakukan ekspor logam timah.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 1,12 persen, diikuti oleh Konstruksi sebesar 0,60 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,57 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,33 persen.

Tujuan	1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kinerja	1): Persentase pertumbuhan PDRB.
Sasaran Strategis	1) meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa perkebunan
Indikator Sasaran	1) Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan

Tabel 3.6

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	4,80	4,90	4,17	4,22	86,9	86,1

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 86,1. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “**berhasil**”. namun bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 86,9 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018.

Faktor penyebab Target kinerja tidak tercapai adalah komitmen /dukungan pemerintah dan adanya rasionalisasi anggaran.

Tabel 3.7

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	4,22	5,15	81,9%

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 4,22, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,15 maka tingkat kemajuan telah mencapai 81,9% sehingga perlu meningkatkan kinerja sebesar 18,1%

Tabel 3.8

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	4,22	3,80	+ 0,42

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 3,80, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target Nasional sebesar 0,42.

Upaya kedepan yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor pertanian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. pengaturan pola tanam pertanian, pemetaan daerah sentra produksi, pengaturan waktu tanam untuk komoditas strategis antar daerah, dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten sehingga meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman
2. Pembangunan infrastruktur pertanian khususnya melalui pembangunan irigasi di beberapa lokasi strategis (lahan produktif), gudang yang dekat dengan sentra produksi khususnya untuk komoditas lada, serta sarana jalan di wilayah pertanian.
3. Peningkatan program ekstensifikasi pertanian, melalui program cetak sawah dan pemetaan lahan produktifitas pertanian
4. Dukungan kepada kelompok tani melalui bantuan teknis dan pendampingan, bantuan sarana produksi pertanian, dan alat atau mesin pertanian
5. Pelatihan industri pengolahan hasil pertanian untuk menciptakan nilai tambah hasil pertanian dan mendorong petani atau pelaku UMKM untuk berfikir inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar
6. Pembiayaan sektor pertanian melalui optimalisasi kredit program dan sistem resi gudang.

Tujuan	1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kinerja	1): Persentase pertumbuhan PDRB
Sasaran Strategis	2) meningkatnya produksi sub sektor perikanan
Indikator Sasaran	2): Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan

Tabel 3.9

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,80	3,85	-3,24	8,11	-85,27	210

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 8,11. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar -85,27 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat drastis dari tahun 2018.

Faktor penyebab Target kinerja dapat tercapai adalah produksi perikanan tangkap meningkat efek meningkatnya aktifitas penjarahan di perairan Bangka Belitung.

Tabel 3.10

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	8,11	4,00	200

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 8,11, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,00 maka tingkat kemajuan telah mencapai 200% sehingga telah melampaui target RPJMD untuk tahun 2022.

Tabel 3.11

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	8,11	6,0	+ 2,11

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 6,0, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target Nasional sebesar 2,11.

Upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor perikanan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan yang bermanfaat untuk memudahkan nelayan mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun pihak swasta, meningkatkan posisi tawar nelayan di pasar, pemanfaatan cold storage secara berkelompok secara efisien.
2. Peningkatan pembiayaan produktif bagi nelayan sebagai contoh pembelian kapal dengan ukuran yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan menangkap ikan yang lebih jauh. Selanjutnya kepada nelayan tersebut perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait teknis operasional kapal,
3. Pelatihan pengolahan hasil perikanan sebagai mata pencaharian substitusi (alternatif) selama nelayan tidak melaut (cuaca, paceklik ikan) dan sebagai salah satu makanan (oleholeh) khas Bangka Belitung,
4. Penyediaan infrastuktur cold storage di wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pengembangan pasar sentra/lelang hasil pertanian dan perikanan,

## 5. Pengembangan Sistem Informasi Harian konsumen dan produsen hasil perikanan.

Tujuan	1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kinerja	1): Persentase pertumbuhan PDRB
Sasaran Strategis	3) :meningkatnya pengembangan dan dan pembangunan pariwisata
Indikator Sasaran	3) :Jumlah kunjungan wisatawan domestik

Tabel 3.12

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya pengembangan dan dan pembangunan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	389.009	389.009	425.942	438.373	109,5	112,6
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09	0,16	0,09	0,13	100	2,08

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan domestik realisasi capaian tahun 2019 sebesar 438.373. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 425.942 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Faktor penyebab Target kinerja dapat tercapai adalah Banyak even nasional/internasional yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Harga tiket yang lebih stabil ditahun 2019.

Jumlah tamu yang menginap pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 45.711 orang. Jumlah ini turun sebesar 3,55 persen dibandingkan dengan jumlah tamu bulan sebelumnya yang sebanyak 47.395 orang (Tabel 1). Jumlah tamu Indonesia mengalami penurunan sebesar

3,78 persen, tetapi jumlah tamu asing meningkat 5,54 persen dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan jumlah tamu yang menginap terjadi di dua kabupaten/kota. Penurunan jumlah tamu di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah masing-masing sebesar 16,32 persen dan 10,29 persen. Sementara itu, peningkatan jumlah tamu menginap terjadi di Kabupaten Bangka sebesar 9,32 persen dan P. Belitung sebesar 7,06 persen.

Pada Desember 2019 hotel berbintang di P. Belitung memiliki jumlah tamu menginap terbanyak. Jumlah tamu menginap di P. Belitung sebanyak 19.780 orang. Jumlah tamu menginap terbanyak berikutnya terdapat di Kota Pangkalpinang sebanyak 12.904 orang, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 7.913 orang, dan Kabupaten Bangka sebanyak 5.114 orang.

Tabel 3.13

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya pengembangan dan pembangunan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	438.373	477.181	91,9
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,13	0,24	54,16

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 438.373, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 477.181 maka tingkat kemajuan telah mencapai 91,9% . sehingga perlu meningkatkan kinerja sebesar 8,1%

Tabel 3.14

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya pengembangan	Jumlah kunjungan wisatawan	438.373	-	

dan dan pembangunan pariwisata	domestik			
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,13	-	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor pariwisata adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan akses transportasi (Aksesibilitas) antara lain menyediakan angkutan umum melalui koperasi taxi, memperluas jangkauan taxi online khususnya sampai ke lokasi pariwisata Tanjung Kelayang, menambah jam operasional bandara, pembukaan izin penerbangan malam, fasilitasi perizinan pembukaan rute penerbangan internasional secara regular dari Negara Korea Selatan Tiongkok dan Malaysia, Percepatan perluasan landasan pacu dan pembangunan bandara H.A.S Hanandjoeddin,
2. Pengembangan Amenitas, antara lain mencakup percepatan pembangunan marina, penyediaan Tourist Information Centre (TIC) pada lokasi yang strategis, penyusunan standarisasi fasilitas umum tempat wisata (safety, health & hygiene, comfort, estetika, dll), penyediaan fasilitas penukaran uang asing (KUPVA), penyediaan fasilitas kapal patrol untuk pengawasan keamanan laut, serta penambahan jumlah homestay berstandar internasional,
3. Pengembangan konsep wisata (Atraksi), antara lain mencakup penambahan atraksi wisata dengan menonjolkan pada aktivitas budaya dan kehidupan masyarakat melalui Desa Wisata seperti Desa Nelayan Tanjung Binga, upaya konservasi bawah laut sebagai bagian dari atraksi wisata, penambahan paket wisata dan atraksi water sport, wisata budaya, wisata konservasi, wisata artificial, pemberdayaan sanggar seni budaya, serta penyelenggaraan event berskala internasional secara rutin,
4. Pembuatan sentra UMKM terpadu, peningkatan kompetensi SDM khususnya pemandu wisata dan menyediakan penjaga pantai, peningkatan sadar wisata masyarakat, fasilitasi pembangunan sekolah vokasi kepariwisataan,
5. Pengembangan strategi promosi wisata antara lain melalui penerapan branding atau cirri khas pariwisata Bangka Belitung, perluasan jangkauan pasar global para pelaku biro wisata, promosi wisata di daerah pintu masuk wisman, promosi wisata

melalui kerjasama wisata G to G, kerjasama internasional antara biro wisata di Belitung dengan biro wisata di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Korea Selatan,

6. Penetapan paket wisata lengkap dari Pulau Belitung dan Pulau Bangka sehingga dampak sektor pariwisata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Pulau Belitung,
7. Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk percepatan investasi : Kementerian Keuangan dan BKPM dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola, Administrator dan Dewan KEK Tanjung Kelayang, serta mendorong percepatan finalisasi masterplan di KEK Tanjung Kelayang, mempercepat penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K),
8. Percepatan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan sertifikasi biro wisata berizin untuk meningkatkan rasa kepercayaan wisatawan mancanegara menggunakan jasa biro wisata local.

Tujuan	1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kinerja	1) : Persentase pertumbuhan PDRB
Sasaran Strategis	4) meningkatnya produksi sektor pertambangan
Indikator Sasaran	4): persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian

Tabel 3.15

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sektor pertambangan	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,53	0,57	-1,08	0,87	-203	152,6

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan pengalihan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 0,87. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar -1,08 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat cukup signifikan dari tahun 2018.

Faktor penyebab Target kinerja dapat tercapai adalah penurunan jumlah ekspor Dan mahalnya Investasi pada sektor pertambangan dan pengalihan.

Tabel 3.16

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya produksi sektor pertambangan	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan pengalihan	0,87	0,73	119,2

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 0,87, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,73 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 119,2 %

Tabel 3.17

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sektor pertambangan	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan pengalihan	0,87	-	

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor pertambangan dan penggalian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan izin usaha dan insentif terhadap perusahaan yang melakukan hilirisasi olahan timah
2. Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan untuk mengembangkan Research & Development, dengan peningkatan teknologi dan inovasi melalui penguatan laboratorium uji SNI, sertifikasi produk, pelatihan SDM industri, dan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk produk-produk timah dan olahan timah

Tujuan	1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kinerja	1): Persentase pertumbuhan PDRB
Sasaran Strategis	5) meningkatnya produksi sektor perindustrian
Indikator Sasaran	5): persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan

Tabel 3.18

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,63	2,65	4,04	1,17	153,6	44,1

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 1,17. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “kurang berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 4,04 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 **menurun** dari tahun 2018.

Faktor penyebab Target kinerja dapat tercapai adalah belum optimalnya pengembangan kawasan industri /kawasan peruntukan industri sebagai salah satu kemudahan lokasi dalam berinvestasi, belum optimalnya penguatan pada produk perkebunan dan perikanan yang memiliki daya saing ekspor non timah dari segi industri 18.377 unit (2019), dari 17.123 (2018) ada kenaikan 7,32% tenaga kerja industri secara total 41.685 orang (2019) dari sebelumnya 40.004 orang (2018) ada kenaikan 4.20%, output industri menurun karena daya beli masyarakat berkurang, pertumbuhan ekonomi indonesia turun dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi 5,02% pada thn 2019 dan pertumbuhan ekonomi bangka belitung turun dari 4,45% pada tahun 2018 menjadi 3,32% pada tahun 2019

Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar Sedang tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12,84 persen. Menurunnya produksi Industri Manufaktur Besar Sedang disebabkan oleh jenis Industri Logam Dasar yang turun hingga sebesar 20,38 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya penurunan produksi untuk menjaga kestabilan harga timah dunia yang cenderung menurun semenjak triwulan III 2019, sedangkan Industri Makanan tumbuh sebesar 6,33 persen. Kenaikan pada Industri Makanan disebabkan oleh adanya kenaikan harga CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar dunia akhir tahun 2019, sehingga mendorong industri kelapa sawit untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan ini juga mendorong naiknya harga TBS (Tandan Buah Segar) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018, produksi Industri Manufaktur Besar Sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,98 persen yang disebabkan oleh peningkatan di kedua kelompok industri, baik Industri Makanan maupun Industri Logam Dasar, yaitu naik masing-masing sebesar 5,17 persen dan 9,47 persen.

Hal ini disebabkan banyak peristiwa yang terjadi pada triwulan IV tahun 2018 yang menyebabkan produksi kedua industri ini menurun. Dimulai dari jatuhnya harga CPO di pasar dunia serta adanya perang dagang antara Amerika Serikat - Cina sehingga saling menghambat perdagangan keduanya. Begitupun dengan penertiban kebijakan

ekspor logam timah dari perusahaan pengolahan yang mewajibkan kepemilikan lahan penambangan.

Pertumbuhan Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2019 skala nasional mengalami peningkatan sebesar yaitu 0,09 persen terhadap triwulan III tahun 2019. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan kelompok industrinya, Industri Makanan dan Industri Logam Dasar mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,52 dan 3,11 persen.

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) triwulan III (Oktober - Desember) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum naik sebesar 0,17 persen terhadap triwulan III 2019. Hal ini disebabkan produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami peningkatan di hampir setiap jenis industri.

Peningkatan terbesar ada pada Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman yang naik hingga sebesar 41,27 persen. Diikuti oleh Industri Alat Angkutan Lainnya serta Industri Furnitur yang masing-masing naik hingga sebesar 17,91 dan 6,24 persen.

Peningkatan produksi di Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman disebabkan oleh adanya peningkatan pesanan untuk persiapan menjelang ujian akhir semester, sedangkan untuk Industri Alat Angkutan Lainnya akibat sudah selesainya pembuatan pesanan perahu di triwulan IV ini.

Selanjutnya adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mempercantik rumah dalam menyambut perayaan hari raya Natal juga mendorong bergeraknya Industri Furnitur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum, apabila dibandingkan dengan Triwulan III 2019, hampir seluruh kategori Industri mengalami peningkatan kecuali beberapa kategori mengalami penurunan.

Industri Pakaian Jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 9,20 persen. Diikuti oleh Industri Makanan dan Tekstil yang masing-masing turun sebesar 3,99 dan 3,77 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemilik industri tersebut yang mengurangi produksi dikarenakan mengambil waktu liburan akhir tahun, sedangkan untuk Industri Makanan yang mayoritas produksinya berhubungan dengan

ikan laut, mengalami penurunan disebabkan cuaca laut yang ekstrim sehingga ikan sulit didapat.

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018, produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebesar 2,26 persen. Sejalan dengan peningkatan produksi, kenaikan terbesar ada pada Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman hingga sebesar 103,25 persen. Hal ini dikarenakan adanya pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Diikuti oleh Industri Minuman dan Industri Alat Angkutan Lainnya yang masing-masing naik sebesar 26,49 dan 5,05 persen. Banyaknya permintaan dari masyarakat membuat industri tersebut semakin meningkat jumlah usahanya dibandingkan dengan tahun 2018.

Berbanding terbalik dengan pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil skala nasional mengalami penurunan sebesar 0,24 persen apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019. Penurunan produksi di skala nasional diantaranya disebabkan oleh penurunan produksi di kategori Industri Alat Angkutan Lainnya yang mengalami penurunan sebesar 4,83 persen, Industri Makanan sebesar 1,74 persen dan Industri Pakaian Jadi sebesar 1,72 persen. (*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020*)

Tabel 3.19

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	1,17	2,86	40,9 %

*Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020*

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 1,17, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,86 maka tingkat kemajuan baru mencapai 40,9 %

Tabel 3.20

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	1,17	-	

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor perikanan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, angkutan udara, jalan raya, dan jembatan Sumatera Bangka dalam rangka peningkatan akses perdagangan barang/jasa dari dan ke Bangka Belitung
2. Pengembangan kerjasama perdagangan antar kota/kabupaten untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dimanfaatkan oleh Rumah Tangga maupun industry
3. Mendorong diversifikasi dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah khususnya komoditas ekspor timah dan komoditas lada
4. Kemudahan pengembangan usaha di sektor industri dan perdagangan melalui implementasi OSS, dan kebijakan insentif bagi eksportir maupun pelaku UMKM
5. Penguatan UMKM yang berdaya saing ekspor dengan cara pemberian sertifikasi produk ekspor dan pelatihan kepada UMKM

Tujuan 1): Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Indikator Kinerja 1): Persentase pertumbuhan PDRB

Sasaran Strategis 6) : terwujudnya kemandirian energi

Indikator Sasaran 6) : Rasio Elektrifitas

Tabel 3.21

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifitas	100	100	100	100	100	100

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Rasio elektrifitas realisasi capaian tahun 2019 sebesar 100 %. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil” dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 100 maka secara capaian nilai nominal tahun 2019 sama dengan tahun 2018.

Tabel 3.22

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifitas	100	100	100

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 100, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 maka tingkat kemajuan telah mencapai 100%

Tabel 3.23

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifitas	100	-	-

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi sub sektor ketenagalistrikan adalah melalui penyediaan listrik sebagai sumber Energi untuk mendukung pengembangan Industri Strategis, melalui

1. Mempermudah izin penggunaan lahan untuk membangun pembangkit listrik,
2. Mempermudah izin pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan oleh swasta dan proses menjual kelebihan listriknya, serta mengatur penentuan harga yang saling menguntungkan ketika akan menjual kembali.

Tujuan	2): meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat.
Indikator Kinerja	3): pendapatan perkapita.
Sasaran Strategis	8): menurunnya pengangguran
Indikator Sasaran	8): Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.24

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	5,60	3,65	3,62	101,40	154,69

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Persentase Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi capaian tahun 2019 sebesar 3,62. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 5,60 maka secara capaian nilai nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 mengalami penurunan dibanding Agustus 2018 pada semua jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kecuali pada jenjang pendidikan Diploma ke bawah yang mengalami penurunan.

TPT Tertinggi Secara umum, komposisi persentase penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja per minggu mengalami perubahan yang cukup signifikan dari Agustus 2018 ke Agustus 2019. Pada Agustus 2019, pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu atau pekerja paruh waktu yaitu sebanyak 212.709 orang (29,71 persen), naik 4,57 poin persen dari kondisi Agustus 2018 yang sebesar 176.343 orang (25,14 persen).

Sementara itu, penduduk yang dianggap pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu pekerja pada jumlah jam kerjanya per minggu 35 jam ke atas (termasuk sementara tidak bekerja) pada Agustus 2019 sebanyak 503.218 orang (70,29 persen), mengalami penurunan sebanyak 21.805 orang (4,57 persen) dibanding kondisi Agustus 2018 yang mencapai 525.023 orang (74,86 persen).

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, jenjang pendidikan SMP ke bawah dan Diploma ke atas memiliki TPT yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. TPT jenjang pendidikan SMP ke bawah untuk daerah perkotaan sebesar 3,32 persen, atau lebih tinggi 1,50 poin persen dibandingkan di perdesaan sebesar 1,82 persen.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma ke atas, TPT perkotaan sebesar 3,21 persen atau lebih tinggi 2,11 poin persen dibandingkan dengan daerah perdesaan sebesar 1,10 persen. pada Agustus 2019 berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK, yaitu sebesar 6,21 persen. Persentase ini naik dibandingkan kondisi Agustus 2018 yaitu sebesar 5,53 persen atau terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,68 poin persen.

Sementara TPT terendah pada jenjang pendidikan SMP ke bawah dengan persentase sebesar 2,49 persen atau naik sebesar 0,16 poin persen dibandingkan kondisi Agustus 2018 sebesar 2,33 persen.

Sementara untuk jenjang pendidikan SMA/SMK, TPT perkotaan lebih rendah daripada perdesaan. TPT perkotaan sebesar 5,87 persen lebih tinggi 1,03 poin persen dibandingkan perdesaan sebesar 6,90 persen. Secara umum terlihat adanya fluktuatif TPT Agustus 2019 di masing-masing tingkat pendidikan dan klasifikasi daerah jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2018.

Selama periode 2018-2019, TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu berada pada kisaran angka 3-4 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki TPT tertinggi pada Agustus 2019 yaitu 5,01 persen dibandingkan kabupaten lainnya.

Sementara itu, kabupaten dengan TPT terendah berada di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 1,71 persen. Terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki TPT lebih besar dari TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,62 persen) yaitu Kabupaten

Bangka (3,80 persen), Kabupaten Bangka Tengah (4,39 persen), Kabupaten Bangka Selatan (3,87 persen), dan Kota Pangkalpinang (5,01 persen).

Sementara 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Belitung (2,90 persen), Kabupaten Bangka Barat (2,85 persen), dan Kabupaten Belitung Timur (1,71 persen) memiliki TPT yang lebih rendah dibandingkan TPT provinsi.

Tabel 3.25

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	5,3	146,40

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 3,62, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,3 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 146,40 %

Tabel 3.26

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	5,01	138,39

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 3,62, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 diatas angka nasional sebesar 138,39

- Tujuan 2): meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat.  
 Indikator Kinerja 3): pendapatan perkapita.  
 Sasaran Strategis 9) menurunnya kemiskinan  
 Indikator Sasaran 9): Persentase penduduk miskin

Tabel 3.27

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,22	5,15	4,77	4,50	109,4	114,4

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Persentase Persentase penduduk miskin realisasi capaian tahun 2019 sebesar 4,50. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar -4,77 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Angka kemiskinan Babel No 4 terendah se-Indonesia (total penduduk Babel th 2019 1.488.792) periode September Tahun 2018 persentase kemiskinan 4,62)

Faktor tercapainya target indikator kinerja adalah data penduduk miskin yang akurat.

Tabel 3.28

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	4,50	5,0	111,1

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 4,50, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,0 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 111,1 %

Tabel 3.29

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	4,50	2,7	+ 1.8

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 2,7, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 telah berhasil melampaui target Nasional sebesar 1,8.

Tujuan	2): meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat.
Indikator Kinerja	3): pendapatan perkapita.
Sasaran Strategis	10) menurunnya inflasi
Indikator Sasaran	10): angka inflasi

Tabel 3.30

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
menurunnya inflasi	angka inflasi	6,42	6,31	3,18	2,62	201,88	240,8

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja angka inflasi realisasi capaian tahun 2019 sebesar 2,62. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 3,18 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Faktor tercapainya target indikator kinerja adalah Terkendalinya inflasi bahan makanan seiring dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya dan upaya pengendalian harga oleh TPID dan Tim Satgas Pangan.

Tabel 3.31

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
menurunnya inflasi	angka inflasi	2,62	6,02	229,7

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 2,62, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 6,02 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 229,7 %

Tabel 3.32

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
menurunnya inflasi	angka inflasi	2,62	3,5	+0,88

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 3,5, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 telah berhasil melampaui target Nasional sebesar 0,88.

Tujuan	2): meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat.
Indikator Kinerja	3): pendapatan perkapita.
Sasaran Strategis	11): terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
Indikator Sasaran	11): Persentase laju pertumbuhan penduduk

Tabel 3.33

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09	2,09	2,03	1,98	102,9	105,6
--	--	------	------	------	------	-------	-------

Sumber : DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja persentase Persentase laju pertumbuhan penduduk realisasi capaian tahun 2019 sebesar 1,98. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 2,03 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Faktor tercapainya target indikator kinerja adalah Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan imigrasi. penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanding dengan angka unmetneed bangka belitung yang juga menurun dari 8,8 (2018) menjadi 8,3 (2019). jumlah kelahiran total di bangka belitung mengalami peningkatan dari 2,25 (tahun 2018) menjadi 2,3 (tahun 2019).

peningkatan angka TFR ini antara lain dipengaruhi oleh Angka CPR (contraceptive prevalence rate) yang menurun dari 68,5 (2018) menjadi 65,08 (2019). namun meningkatnya angka kelahiran total (TFR) ini tidak berpengaruh terhadap angka laju pertumbuhan penduduk. terbukti bahwa angka laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru semakin menurun dari 2,03 (2018) menjadi 1,98 (2019). hal ini sebanding dengan persentase unmetneed (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani) yang juga menurun dari 8,8 (2018) menjadi 8,3 (2019).

Tabel 3.34

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,98	2,08	105,05

Sumber : DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 1,98, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,08 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 105,05 %

Tabel 3.35

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,98	-	-

Sumber : DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b. Misi Kedua :

**Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas**

Tujuan 3) : meningkatnya infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas.

Indikator Kinerja 4): Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi

Sasaran Strategis 12): meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator Sasaran 13): rasio ketersediaan transportasi layak jalan

Tabel 36

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya konektivitas antar wilayah	rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,00038	0,10	0,0136	0,10	3578,9	100

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja rasio ketersediaan transportasi layak jalan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 0,10. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan "berhasil". dan bila dilihat dari realisasi

capaian tahun 2018 sebesar 0,0136 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Faktor tercapainya target indikator kinerja adalah realisasi yang tercapai merupakan dari kegiatan rehabilitasi dan kegiatan peningkatan bukan dari kegiatan pembangunan irigasi.

Tabel 3.37

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatkan konektivitas antar wilayah	rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,10	-	-

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 3): meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Indikator Kinerja 4): pertumbuhan subsektor jasa konstruksi.

Sasaran Strategis 12): meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator Sasaran 14): persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi

Tabel 3.38

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatkan konektivitas antar wilayah	persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	12,16	11,43	11,43	11,43	93,99	100

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi realisasi capaian tahun 2019 sebesar 11,43. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 11,43 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 tetap dari tahun 2018. Faktor tercapainya target adalah adanya dukungan anggaran.

Tabel 3.39

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya konektivitas antar wilayah	persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43	100

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 11,43, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 11,43<sup>3</sup> maka tingkat kemajuan telah mencapai 100 %,

Tabel 3.40

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya konektivitas antar wilayah	persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	11,43	-	-

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 3): meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Indikator Kinerja 4): pertumbuhan subsektor jasa konstruksi.

Sasaran Strategis 13) meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator Sasaran 15): persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps

Tabel 3.41

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya konektivitas antar wilayah	persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20	0,40	0,20	0,84	100	210

Sumber : Dinas PERKIM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja persentase akses jalan lingkungan yang memadai realisasi capaian tahun 2019 sebesar 23,17 %. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “cukup berhasil”. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah karena merubah output sesuai dengan angka optimis anggaran.

Tabel 3.42

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya konektivitas antar wilayah	persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,84	0,60	140

Sumber : Dinas PERKIM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 0,84, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,60% maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 140%

Tabel 3.43

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya konektivitas antar wilayah	persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,84	-	-

Sumber : Dinas PERKIM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

**c. Misi Ketiga :**

**Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal**

Tujuan 4) : meningkatnya lama sekolah masyarakat.

Sasaran 13) : meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat

Indikator Sasaran 16): harapan lama sekolah

Tabel 3.44

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	harapan lama sekolah	11,84	11,89	11,87	11,94	100,2	100,4

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja harapan lama sekolah realisasi capaian tahun 2019 sebesar 11,94. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 11,87 maka nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Tabel 3.45

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya	harapan lama	11,94	12,00	99,5

pendidikan masyarakat	bagi	sekolah			
-----------------------	------	---------	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 11,94, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 12,00 maka tingkat kemajuan telah mencapai 99,5 %

Tabel 3.46

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah	11,94	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 4) : meningkatnya lama sekolah masyarakat.

Sasaran 13) : meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat

Indikator Kinerja 17) : Rata-rata lama sekolah

Tabel 3.47

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya lama sekolah masyarakat.	Rata-rata lama sekolah	7,76	7,83	7,84	7,98	100,3	101,9

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran, indikator kinerja Rata-rata lama sekolah realisasi capaian tahun 2019 sebesar 7,98. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan "sangat berhasil". dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 7,84 maka nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya pendidikan formal yang pernah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2010, anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 10,48 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas XI Sekolah Menengah Atas.

Sementara itu, penduduk 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,07 tahun, atau setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas VII Sekolah Menengah Pertama. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2019, penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah selama 11,94 tahun, atau hampir setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga mengalami peningkatan menjadi 7,98 tahun atau setara dengan masa pendidikan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,46 persen per tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,36 persen per tahun. Pendidikan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik.

Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Usaha yang lebih keras dan berkesinambungan mutlak diperlukan, mengingat angka HLS dan RLS di Kepulauan Bangka Belitung masih cukup jauh di bawah angka nasional

Tabel 3.48

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya lama sekolah masyarakat.	Rata-rata lama sekolah	7,98	8,00	99,8

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 7,98, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8,00 maka tingkat kemajuan telah mencapai 99,8 %

Tabel 3.49

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya lama sekolah masyarakat.	Rata-rata lama sekolah	7,98	8,8	-0,82

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 3,80, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target Nasional sebesar 0,42.

**d. Misi Keempat Meningkatkan Kesehatan Masyarakat**

Tujuan 5) : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator ) : Angka Usia Harapan Hidup

Sasaran Kinerja 14) : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja 18) : Angka Harapan Hidup

Tabel 3.50

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	69,98	70,16	70,18	70,50	100,3	100,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Angka Harapan Hidup realisasi capaian tahun 2019 sebesar 70,50. Dari persentase capaian kinerja sasaran

tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 70,18 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Umur Harapan Hidup adalah umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Selama periode 2010 hingga 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir bertambah 1,35 tahun atau sekitar 16 bulan 6 hari. Secara rata-rata, Umur Harapan Hidup bertambah 0,22 persen setiap tahunnya. Bayi yang lahir pada tahun 2010 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 69,15 tahun atau sekitar 69 tahun 1 bulan 24 hari. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun, ikut berpengaruh meningkatkan harapan yang baru lahir pada tahun 2019, menjadi 70,50 tahun atau sekitar 70 tahun 6 bulan.

Tabel 3.51

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Usia Harapan Hidup	70,50	70,48	100,02

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 70,50, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 70,48 maka tingkat kemajuan telah melampaui target sebesar 100,02 %

Tabel 3.52

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya derajat kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,50	71,34	-0,84

masyarakat.				
-------------	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 71,34, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 di bawah target Nasional sebesar -0,84

Tujuan 5) : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Kinerja 6) : Angka Usia Harapan Hidup

Sasaran Strategis 14) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Sasaran 19): Angka Kematian Ibu

Tabel 3.53

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	89,85	22	167,24	137,34	53,72	16,01

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Angka Kematian Ibu realisasi capaian tahun 2019 sebesar 16,01. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “kurang berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi tahun 2018 sebesar 167,24 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018.

Tabel 3.54

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	137,3	21	15,29

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 137,3, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 21 maka tingkat kemajuan baru mencapai 15,29 %

Tabel 3.55

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	137,3	-	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 5) : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Kinerja 6) : Angka Usia Harapan Hidup

Sasaran Strategis 14) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Sasaran 20): Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Tabel 3.56

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	7,2	7,180	6,31	7,172	114,10	100,11

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Angka Kematian Bayi realisasi capaian tahun 2019 sebesar 7,172. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan "sangat berhasil". dan bila dilihat dari realisasi tahun 2018 sebesar 6,31 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Tabel 3.57

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
-------------------	-------------------	-----------	--------------------	------------------

1	2	4	3	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	7,172	7,160	99,83

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 7,172 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 7,160 maka tingkat kemajuan telah mencapai 99,83%

Tabel 3.58

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	7,172	-	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 5) : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Kinerja 6) : Angka Usia Harapan Hidup

Sasaran Strategis 14) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Sasaran 21): Angka stunting

Tabel 3.59

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka stunting	26,5	28	10,65	7,70	240	363.63

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Angka stunting realisasi capaian tahun 2019 sebesar 7,70. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut,

dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi tahun 2018 sebesar 10,65 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Tabel 3.60

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka stunting	7,70	24	311,68

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 7,70 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 24 maka tingkat kemajuan telah mencapai 311,68%

Tabel 3.61

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka stunting	7,70	-	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

#### e. Misi Kelima :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**

Sasaran 15) : meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik.

Indikator Kinerja 22) : Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan

Tabel 3.62

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audisi BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Opini Audisi BPK Atas Laporan Keuangan realisasi capaian tahun 2019 mendapat WTP. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 juga mendapat WTP maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 adalah dapat mempertahankan WTP seperti tahun 2018.

Faktor tercapainya target kinerja adalah peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.63

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audisi BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mendapat predikat WTP, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah predikat WTP maka tingkat kemajuan telah memenuhi target sebesar 100 %

Tabel 3.64

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audisi BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional adalah predikat WTP, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 telah sesuai dengan target Nasional.

Sasaran 15) : meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik.

Indikator Kinerja 23) : Indeks reformasi birokrasi

Tabel 3.65  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Tujuan	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
terwujudnya RB yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	64,08	65,39	65,39	66,84	102,20	102,21

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi realisasi capaian tahun 2019 sebesar 66,84. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 65,39 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 tetap dari tahun 2018.

Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Akan dilakukan upaya nyata dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.
2. Identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan akan lebih optimal.
3. Evaluasi kelembagaan lebih dapat mendorong penerapan organisasi berbasis kinerja.
4. Melakukan asesmen kompetensi terhadap seluruh pegawai.
5. Lebih berupaya secara optimal dalam pengajuan unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK.

Tabel 3.66  
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	66,84	69,50	96,17

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 66,84, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 69,50 maka tingkat kemajuan telah mencapai 96,17 %

Tabel 3.67

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	66,84	-	-

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 7) : Terwujudnya Pembangunan Demokrasi.

Indikator Kinerja 8) : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

Sasaran Strategis : 16. Meningkatnya aspek kebebasan Sipil

Indikator Sasaran : 24. Skor aspek kebebasan sipil

Tabel 3.68

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,55	87,76	83,07	80,95	94,89	92,24

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Skor aspek kebebasan sipil realisasi capaian tahun 2019 sebesar 80,95. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 83,07 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018.

Faktor tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut

1. Adanya ancaman kekerasan oleh aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Adanya ancaman kekerasan oleh masyarakat karena Gender, Etnis atau terhadap kelompok orang rentan lainnya.

Tabel 3.69

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Meningkatnya kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	80,95	87,82	92,17%

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 80,95, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 87,82 maka tingkat kemajuan telah mencapai 92,17 %.

Tabel 3.70

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	80,95	75	5,95 (naik)

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 75, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target Nasional sebesar 5,95.

Tujuan 7) : Terwujudnya Pembangunan Demokrasi.

Indikator Kinerja 8) : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

Sasaran Strategis :17). Meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat

Indikator Sasaran :25). Skor aspek hak-hak politik

Tabel 3.71

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81.72	81.76	82,30	73,56	100,7	90

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Skor aspek hak-hak politik realisasi capaian tahun 2019 sebesar 73,56. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 82,30 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 **menurun** dari tahun 2018.

Faktor tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan Kab/Kota
2. pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 3.72

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	73,56	81,85	89,8%

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 73,56, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 81,85 maka tingkat kemajuan telah mencapai 89,8 %.

Tabel 3.73

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	73,56	75	-1.44

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 75, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 dibawah target Nasional sebesar -1,44.

Tujuan	7) : Terwujudnya Pembangunan Demokrasi.
Indikator Kinerja	8) : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Sasaran Strategis	:18). Meningkatkan aspek lembaga demokrasi
Indikator Sasaran	:26). Skor aspek lembaga demokrasi

Tabel 3.74

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya aspek lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,30	80,33	72,89	63,76	90,78	79,37

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Skor aspek lembaga demokrasi realisasi capaian tahun 2019 sebesar 63,76. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 72,89 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 **menurun** dari tahun 2018.

Faktor tidak tercapainya tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. persentase alokasi anggaran pendidikan ,dan anggaran kesehatan terhadap total APBD
2. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
3. Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah
4. Keputusan hakim yang kontroversial
5. Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah Perda yang dihasilkan

Tabel 3.75

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Meningkatnya aspek lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	63,76	80,54	79,16%

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 63,76, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80,54 maka tingkat kemajuan mencapai 79,16 %

Tabel 3.76

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya aspek lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	63,76	75	-11,24

Sumber : Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 75, bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 dibawah target Nasional sebesar -11,24.

**f. Misi Keenam :****Pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**

Tujuan 8) : Meningkatnya tata kelola kebencanaan.

Indikator Kinerja 6) : Indeks Resiko Bencana

Sasaran Strategis : 19). Meningkatnya kapasitas bencana daerah

Indikator Sasaran : 27). Indeks kapasitas bencana daerah

Tabel 3.77

## Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kapasitas bencana daerah	Indeks kapasitas bencana daerah	0,15	0,20	-	0,24		120

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Indeks kapasitas bencana daerah realisasi capaian tahun 2019 sebesar 0,24. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”.

Faktor yang harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kapasitas bencana daerah adalah pemahaman kajian kapasitas yang terdiri dari 07 fokus prioritas untuk dapat dilaksanakan seperti halnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan Perencanaan terpadu, Pengembangan Sistem setiap informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan Efektivitas dan pencegahan Mitigasi Bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 071 indikator pencapaian

Tabel 3.78

## Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Meningkatnya kapasitas bencana daerah	Indeks kapasitas bencana daerah	0,24	0,35	68,58

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 0,24 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,35 maka tingkat kemajuan telah mencapai 68,58 %

Tabel 3.79  
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas bencana daerah	Indeks kapasitas bencana daerah	0,24	-	-

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tujuan 8) : Meningkatnya tata kelola kebencanaan.  
 Indikator Kinerja 6) : Indeks Resiko Bencana  
 Sasaran 20) : Peningkatan kualitas lingkungan hidup.  
 Indikator Kinerja 28) : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.80  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,76	60,96	70,24	65,80	117,5	107,93

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup realisasi capaian tahun 2019 sebesar 65,80. Dari persentase capaian kinerja sasaran tersebut, dikategorikan “sangat berhasil”. dan bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2018 sebesar 70,24 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018.

Faktor tercapainya target indikator kinerja dipengaruhi oleh nilai IKA dan IKTL. Nilai IKA berdasarkan hasil pemantauan dan hasil perhitungan dengan metodologi IKA-

NSF yang dilakukan untuk 11 sungai memperlihatkan IKA eksisting 72 titik sampling memenuhi status mutu, dan 57 titik atau 44,2 % cemar ringan, hal ini diperkirakan karena berkurangnya aktifitas pertambangan darat yang berkorelasi terhadap kualitas air sungai. Disamping upaya rehabilitasi serta pengurangan pencemaran yang dilakukan seperti program-program kota bersih Adipura, peningkatan ketaatan pelaku usaha, serta sosialisasi persampahan sehingga potensi limbah yang dibuang ke lingkungan (khususnya *runoff* ke sungai bisa diminimalkan), selain itu IKLH didukung dengan peningkatan nilai IKTL, Indek Kualitas Tutupan Lahan.

Tabel 3.81

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan akhir RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	4	3	5
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,80	64,69	96,61

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari realisasi Tahun 2019 yang telah mencapai 65,80, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 64,69 maka tingkat kemajuan telah mencapai 96,61%

Tabel 3.82

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,80	66,5	0,7

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila dibandingkan dengan Target Nasional di angka 66,5 bahwa dapat dikatakan realisasi Tahun 2019 berhasil melampaui target Nasional sebesar 0,7.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c) Pajak Air Permukaan (PAP);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
- b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
- c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
- d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang besar, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi, karena itu instansi

pemungut dapat mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi. Strategi yang tepat yang diimplementasikan melalui sebuah kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan restribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

1. Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2019. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 2.762.433.155.880,37 dan realisasi sebesar Rp. 2.695.111.736.771,27 atau 97,56%. Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 138.134.024.846,92 atau menurun 5,40%.

Perincian terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2019, sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp. 884.562.215.880,37, Realisasi anggaran Rp. 826.888.372.498,27 atau 93,48 % dengan perincian :

- 1) Pajak daerah ditargetkan Rp. 790.139.435.584,04, terealisasi Rp. 750.814.242.494,42 atau 95,02%;
- 2) Restribusi daerah ditargetkan Rp. 9.315.527.150,00, terealisasi Rp. 8.726.344.417,00 atau 93,67 %;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp. 5.500.000.000,00, terealisasi Rp. 5.442.309.381,71 atau 98,95%;
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp.79.607.253.146,33 terealisasi Rp. 61.905.476.205,14 atau 77,76%;

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan Rp. 1.766.282.638.000,00.

Dari target tersebut terealisasi Rp. 1.743.152.363.799,00 atau 98,69% dengan perincian :

- 1) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebanyak Rp. 204.413.867.656,00;
- 2) Dana Alokasi Umum sebanyak Rp. 960.343.039.000,00;
- 3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp. 578.395.457.143,00;

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan mengalami kenaikan dari Rp. 1.694.218.759.243,00 pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp. 1.743.152.363.799,00 dalam tahun anggaran 2019 atau meningkat 2,89%.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan Rp. 111.588.302.000,00. Dari target tersebut terealisasi Rp. 125.071.000.474,00 atau 112,08 % dengan perincian :

- 1) Hibah sebanyak Rp. 99.585.198.474,00;
- 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 25.485.802.000,00;

Dibanding dengan tahun anggaran 2018, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan dari Rp. 12.317.177.850,00 Pada tahun 2018 menjadi Rp. 125.071.000.474,00 pada tahun 2019 atau meningkat 915,42%.

Aspek kinerja pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya sebanyak 138.134.024.846,92 atau menurun 5,40%, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.83

## Laporan Realisasi APBD TA. 2019

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		bertambah/(berkurang)	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	PAD				
1.1.1	Pajak Daerah	790.139.435.584,04	750.814.242.494,42	(39.325.193.089,62)	4,98
1.1.2	Retribusi Daerah	9.315.527.150,00	8.726.344.417,00	(589.182.733,00)	6,32
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	(57.690.618,29)	1,05
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	79.607.253.146,33	61.905.476.205,14	(17.701.776.841,19)	22,24
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	228.805.440.000,00	204.413.867.656,00	(24.391.572.344,00)	10,66
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	960.343.039.000,00	(86.519.583.000,00)	8,26
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	490.614.576.000,00	578.395.457.143,00	87.780.881.143,00	17,89
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	13.482.698.474,00	15,66
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.485.802.000,00	25.485.802.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah pendapatan daerah</b>	<b>2.762.433.155.880,37</b>	<b>2.695.111.736.771,27</b>	<b>(67.321.419.109,10)</b>	<b>2,44</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2014 s.d 2019 seperti tampak dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih merupakan pendapatan yang berkontribusi paling besar rata-rata 64,68%, Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergantung pada transfer dari pemerintah Pusat. Di urutan kedua adalah Pendapatan Asli Daerah rata-rata 30, 68 % dan yang ketiga Lain-lain Pendapatan Yang Sah 4,64%.

Berdasarkan data perkembangan beberapa tahun terakhir proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memberikan kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam rangka mendukung

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini disampaikan rekapitulasi proporsi dan kontribusi PAD terhadap kekuatan APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.84  
Proporsi PAD TA. 2019

NO	TAHUN	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi PAD thd Pendapatan Daerah (%)
1	2014	Rp563.108.840.861,42	Rp1.719.774.423.456,42	32,74%
2	2015	Rp571.802.890.055,14	Rp1.886.998.635.504,14	30,30%
3	2016	Rp574.258.443.819,77	Rp1.949.866.524.266,77	29,45%
4	2017	Rp709.832.181.818,48	Rp2.250.952.975.872,48	31,53%
5	2018	Rp850.479.397.331,35	Rp2.564.417.524.733,35	33,17%
6	2019	Rp826.888.372.498,27	Rp2.695.111.736.771,27	30,69%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Khusus terkait dengan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 2,85% dari tahun 2018. Sedangkan untuk pajak daerah juga mengalami penurunan sebesar 4,85% per tahun. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.85  
Kontribusi Pajak TA. 2019

NO	TAHUN	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
1	2014	Rp563.108.840.861,42	Rp502.262.616.895,88	90,26%
2	2015	Rp571.802.890.055,14	Rp506.394.936.060,22	88,66%
3	2016	Rp574.258.443.819,77	Rp507.983.460.531,72	88,46%

4	2017	Rp701.447.982.673,55	Rp629.136.457.212,39	88,63%
5	2018	Rp850.479.397.331,35	Rp787.235.420.038,83	92,56%
6	2019	Rp826.888.372.498,98	Rp750.814.242.494,42	90,80%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah.

Pada tahun anggaran 2019 dialokasikan anggaran sebanyak Rp.3.064.703.819.549,99. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 2.785.051.756.383,58 atau 94,62 % dengan perincian sebagai berikut :

### a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 1.667.747.481.777,99 . Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja Pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp1.578.026.530.537,28atau 94,62 %;

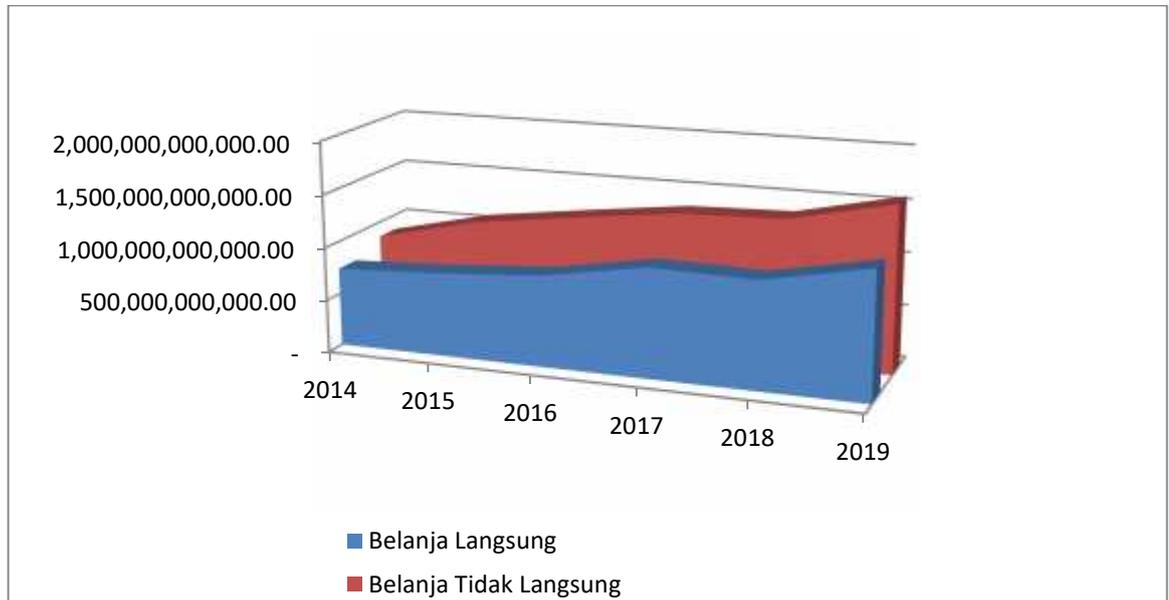
### b) Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan Rp. 1.396.956.337.772,00 .Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja Pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 1.207.025.225.846,30 atau 86,40%.

Secara keseluruhan diketahui bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2018, hal ini disebabkan upaya perbaikan dalam pengelolaan belanja daerah dengan melakukan percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan dalam rapim setiap triwulan, untuk mengevaluasi progres penyerapan belanja OPD.

Gambar 3.3

## Struktur Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Grafik di atas menggambarkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar realisasinya adalah Belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan belanja langsungnya. Adapun komposisi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh belanja lain-lain selanjutnya diikuti oleh belanja Pegawai lalu Belanja Belanja Barang dan Jasa rata-rata dan ditutup oleh Belanja Modal.

Persentase realisasi belanja provinsi yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagihasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD Provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal memiliki tren meningkat sedangkan realisasi belanja pegawai menurun.

Realisasi Belanja Daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dengan menganut sitem prinsip Akuntabilitas, Efektif dan Efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, Anggaran dan realisasi belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel beritung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, Anggaran dan realisasi belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.86  
Belanja Langsung Tahun 2019

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		bertambah/(berkurang)	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.396.956.337.772,00</b>	<b>1.207.025.225.846,30</b>	<b>(189.931.111.925,70)</b>	<b>13,60</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	68.572.393.000,00	64.737.516.208,00	(3.834.876.792,00)	5,59
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.980.385.728,00	700.956.706.797,44	(150.023.678.930,56)	17,63
5.2.3	Belanja Modal	477.403.559.044,00	441.331.002.840,86	(36.072.556.203,14)	7,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel 3.87  
Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		bertambah/(berkurang)	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.667.747.481.777,99</b>	<b>1.578.026.530.537,28</b>	<b>(89.720.951.240,71)</b>	<b>5,38</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	831.673.001.025,99	769.910.380.379,01	(61.762.620.646,98)	7,43
5.1.4	Belanja Hibah	289.082.219.060,00	295.620.904.060,00	6.538.685.000,00	2,26

5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	441.515.000,00	(308.485.000,00)	41.13
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/Kota/dan Pemerintahan Desa	446.568.577.113,00	423.625.933.450,93	(22.942.643.662,07)	5.14
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota/dan Pemerintahan Desa	95.095.479.172,00	88.427.797.647,34	(6.667.681.524,66)	7.01

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020*

## 2. Analisis Penggunaan Sumber daya Anggaran

### a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan :

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.88  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90	4,22	86,12	26.900.052.250	25.491.458.848	94,76	-
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,85	8,11	210,64	18.427.978.240	10.283.161.439	55,80	44,20
3	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan domestik	389.009	438.373	112,68	27.355.659.150	23.509.165.733	85,94	14,06
		Persentase peningkatan jumlah	0,16	0,13	81,25	27.355.659.150	23.509.165.733	85,94	-

		wisatawan							
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan	0,57	0,87	152,63	393.463.000	215.359.600	54,73	45,27
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,65	1,17	44,15	2.922.258.300	2.631.926.861	90,06	
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	100	100	100	303.075.000	75.506.405	24,91	75,09
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Rasip Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,29	0,27	93,10	9.843.584.620	8.194.591.752	83,25	
8	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60	3,62	154,69	9.298.082.254	8.279.346.731	89,04	10,96
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Kemiskinan	5,15	4,50	114,44	48.668.128.648	43.335.213.872,32	89,04	10,96
10.	Menurunnya angka Inflasi	Angka Inflasi	6,31	2,62	240,83	3.787.444.000	2.835.493.123,17	74,87	25,13
11.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,09	1,98	105,55	1.914.966.000	1.671.535.113	87,29	12,71
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12	0,10	0,10	100	1.431.917.785	1.058.824.416	73,94	26,06

		Mbps							
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan transportasi layak jalan	11,43	11,43	100	16.191.874.118	14.888.720.247,02	91,95	8,05
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	0,40	0,84	210	278.667.506.300	270.361.191.830	97,02	2,98
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,89	11,87	99,83	82.548.962.767	73.223.353.912	88,70	-
		rata rata lama sekolah	7,83	7,98	101,91	211.387.616.350	158.039.543.768	74,76	25,24
14.	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,16	70,50	100,48	33.064.963.038	27.050.337.287	81,80	18,2
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	22	137,34	16,01	668.490.000	471.580.200	70,54	-
		Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	7.180	7.172	100,11	465.240.700	407.857.188	87,67	12,33
		Angka Stunting	28	7,70	363,636	1.004.640.000	724.538.885	72,12	27,88

15.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	2.961.173.000	1.845.010.485	62,31	37,69
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,39	66,84	102,21	60.678.522.784	52.984.439.619	87,32	12,68
16.	Meningkatnya Kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	87,76	100	3.842.718.300	3.417.843.018	88,94	11,06
17	Meningkatnya aspek hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,76	73,56	100	831.045.000	644.053.552	77,50	22,5
18	meningkatnya aspek lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33	63,76	100	212.898.000	111.690.694	52,46	47,54
19	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,20	0,24	120	7.052.325.000	5.996.117.161	85,02	14,98
20	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	60,96	65,80	107,93	11.348.405.146	8.013.027.820,98	70,61	29,39

Ket : \*) Data Tahun 2020

### 3. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing tujuan RPJMD. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Secara keseluruhan total efisiensi anggaran sebesar **Rp. 103.541.663.826,-** jumlah tersebut berasal dari efisiensi 18 sasaran yang capaian kerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produksi Sub sektor perikanan, realisasi kinerja mencapai 210,64 % dengan efisiensi sebesar 44,20 %.
- b. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata, realisasi kinerja mencapai 112,68 % dengan efisiensi sebesar 14,06 %.
- c. Meningkatnya produksi sektor pertambangan, realisasi kinerja mencapai 152,63% dengan efisiensi sebesar 45,27 %.
- d. Terwujudnya kemandirian energi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 75,09%.
- e. Menurunnya pengangguran, realisasi kinerja mencapai 154,69% dengan efisiensi sebesar 10,96%.
- f. Menurunnya kemiskinan, realisasi kinerja mencapai 114,44% dengan efisiensi sebesar 10,96%.
- g. Menurunnya inflasi, realisasi kinerja mencapai 240,83% dengan efisiensi sebesar 25,13%.
- h. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, realisasi kinerja mencapai 105,55% dengan efisiensi sebesar 12,71%.
- i. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan indikator Kinerja sebagai berikut :
  - Rasio ketersediaan transportasi layak jalan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 8,05%.
  - Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi, realisasi kinerja mencapai 210% dengan efisiensi sebesar 2,98%.

- Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 26,06 %.
- j. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat, realisasi kinerja mencapai 101,91% dengan efisiensi sebesar 25,24%.
- k. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - Angka harapan hidup, realisasi kinerja mencapai 100,48% dengan efisiensi sebesar 18,20 %
  - Angka Kematian Bayi, realisasi kinerja mencapai 100,11, dengan efisiensi sebesar 12,33 %.
  - Angka stunting, realisasi kinerja mencapai 363, 63% dengan efisiensi sebesar 27,88%.
- l. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 37,69%.
  - Indeks Reformasi Birokrasi, realisasi kinerja mencapai 102,21% dengan efisiensi sebesar 12,68 %
- m. Meningkatnya kebebasan sipil, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 11,06%.
- n. Meningkatnya aspek hak-hak politik, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 22,5 %.
- o. Meningkatnya aspek lembaga demokrasi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 47,54 %.
- p. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana, realisasi kinerja mencapai 120% dengan efisiensi sebesar 14,98 %
- q. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kinerja mencapai 107,93 % dengan efisiensi mencapai 29,39 %.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari sisa lelang, perjalanan dinas dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan.

## BAB IV

### PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Untuk lebih jelasnya kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2019 dan langkah dimasa mendatang diuraikan sebagai berikut, yaitu :

#### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Tahun 2019, mulai dari pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 20 sasaran dan 28 indikator kinerja sasaran.
2. Dari indikator kinerja tersebut, dapat dijabarkan secara rinci melalui pengukuran capaian indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 16 indikator kinerja sasaran dengan capaian **sangat berhasil**, 10 indikator kinerja sasaran dengan capaian **berhasil**, dan 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian **kurang berhasil**.
3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah :
  - a. Meningkatnya produksi Sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, realisasi kinerja sebesar 86,12 %.
  - b. Meningkatnya produksi Sub sektor perikanan, realisasi kinerja mencapai 210,64 % dengan efisiensi sebesar 44,20 %.
  - c. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata, realisasi kinerja mencapai 112,68 % dengan efisiensi sebesar 14,06 %.
  - d. Meningkatnya produksi sektor pertambangan, realisasi kinerja mencapai 152,63% dengan efisiensi sebesar 45,27 %.
  - e. Terwujudnya kemandirian energi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 75,09%.
  - f. Menurunnya pengangguran, realisasi kinerja mencapai 154,69% dengan efisiensi sebesar 10,96%.
  - g. Menurunnya kemiskinan, realisasi kinerja mencapai 114,44% dengan efisiensi sebesar 10,96%.

- h. Menurunnya inflasi, realisasi kinerja mencapai 240,83% dengan efisiensi sebesar 25,13%.
- i. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk, realisasi kinerja mencapai 105,55% dengan efisiensi sebesar 12,71%.
- j. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan indikator Kinerja sebagai berikut :
- Rasio ketersediaan transportasi layak jalan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 8,05%.
  - Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi, realisasi kinerja mencapai 210% dengan efisiensi sebesar 2,98%.
  - Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 26,06 %.
- k. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat, realisasi kinerja mencapai 101,91% dengan efisiensi sebesar 25,24%.
- l. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- Angka harapan hidup, realisasi kinerja mencapai 100,48% dengan efisiensi sebesar 18,20 %
  - Angka Kematian Bayi, realisasi kinerja mencapai 100,11, dengan efisiensi sebesar 12,33 %.
  - Angka stunting, realisasi kinerja mencapai 363, 63% dengan efisiensi sebesar 27,88%.
- m. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 37,69%.
  - Indeks Reformasi Birokrasi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 12,68 %
- n. Meningkatnya kebebasan sipil, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 11,06%.

- o. Meningkatnya aspek hak-hak politik, relaisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 22,5 %.
  - p. Meningkatnya aspek lembaga demokrasi, realisasi kinerja mencapai 100% dengan efisiensi sebesar 47,54 %.
  - q. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana, realisasi kinerja mencapai 120% dengan efisiensi sebesar 14,98 %
  - r. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kinerja mencapai 107,93 % dengan efisiensi mencapai 29,39 %.
4. Total efisiensi anggaran sebesar **Rp. 103.541.663.826,-** jumlah tersebut berasal dari efisiensi 18 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target
  5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2019. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 2.762.433.155.880,37 dan terealisasi sebesar Rp. 2.695.111.736.771,27 atau 97,56 %. Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 138.134.024.846,92 atau menurun 5,40%.
  6. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp. 3.064.703.819.549,99 dan realisasi sebesar Rp. 2.785.051.756.383,58 atau 94,62 %.

## B. Langkah Dimasa Yang Akan Datang

Langkah dimasa yang akan datang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah ke publik. Adapun langkah-langkah yang diperlukan adalah

1. Mendorong program-program prioritas pelaksanaan anggaran dan kegiatan diarahkan pada skala prioritas berdasarkan indikator kinerja utama.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan target indikator kinerja utama satu bulan sekali.

3. Melakukan upaya pemberlakuan indikator kinerja utama berbasis digital.
4. Membentuk tim terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melakukan evaluasi tingkat capaian dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan target capaian indikator kinerja utama.
5. Perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama, perlu menyampaikan laporan perkembangan realisasi perbulan ke penanggungjawab atau tim terpadu pengendalian indikator kinerja utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. guna pengumpulan data capaian kinerja yang tepat waktu, kepala Perangkat Daerah harus memiliki komitmen kuat menyampaikan data kinerja tepat waktu. Sehingga agar lebih efektif dapat memberlakukan reward and punishment terhadap penyampaian data bulanan maupun triwulanan.

# **LAMPIRAN**



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR:188.44/ 725.a /VII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 - 2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018-2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah disampaikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai tugas :
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPangkalpinang  
Pada Tanggal Juli 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke that ends in a small hook.

ERZALDI ROSMAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 TAHUN 2017-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PD
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan            Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan.            X<sub>t</sub> : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun ini            X<sub>t-1</sub> : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun lalu</p>	Dinas Petanian
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan            Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan.            X<sub>t</sub> : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun ini            X<sub>t-1</sub> : Nilai produksi produksi sub sektor perikanan pada tahun lalu</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	Jumlah orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan. (RUMUS)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun ini dikurangi jumlah wisatawan tahun lalu dibagi jumlah wisatawan tahun lalu dikali 100%	
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan  Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian  X<sub>t</sub> : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun ini  X<sub>t-1</sub> : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun lalu</p>	ESDM
5	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan  Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan  X<sub>t</sub> : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun ini  X<sub>t-1</sub> : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun lalu</p>	PERINDAG
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	$\frac{\text{Jumlah pelanggan}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	ESDM
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD	Total Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	BAKUDA
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja yang ada.	DISNAKER

			$\text{TPT} = \frac{\text{JumlahPengangguran}}{\text{JumlahAngkatanKerja}} \times 100\%$	
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p><i>Headcount Index</i> (HCI – P<sub>0</sub>) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. <i>Headcount index</i> secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:  P<sub>0</sub> = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>)  z = Garis kemiskinan  y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y<sub>i</sub> &lt; z  q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  n = Jumlah penduduk</p>	DINSOS
10	Menurunnya Inflasi	AngkaInflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumusnya:</p> $\text{INF}_n = \frac{(\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1})}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100$ <p>Dimana:  INF<sub>n</sub> : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)  IHK<sub>n</sub> : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)  IHK<sub>n-1</sub> : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)</p>	DISPERINDA G

11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	<p>Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Rumus:</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Metode Geometri  r : laju pertumbuhan penduduk  P<sub>t</sub> : jumlah penduduk pada tahun t  P<sub>0</sub> : jumlah penduduk pada tahun awal  t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p>	PEREMPUAN
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi jalan	Jumlah ketersediaan angkutan dibagi jumlah penduduk	DISHUB
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	$\frac{\text{Jumlah jaringan jalan provinsi}}{\text{jumlah kab/kota}} \times 100\%$	PU
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	KOMINFO
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	<p><math>\frac{\text{Lama sekolah}}{\text{anak pada umur tertentu di masa mendatang.}}</math></p> $HLS_a^t - FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:  HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  FK = Faktor koreksi pesantren  E<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  P<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t  i = Usia (a, a+1, ..., n)</p>	DISDIK
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	DISDIK

			$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ol>	
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AngkaHarapanHidup	rata-rata jumlah tahun <b>kehidupan</b> yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu	DINKES
		AngkaKematianIbu	jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	
		AngkaKematianBayi	Jumlha kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	x 100.000
		AngkaKematianBayi	$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana :</p> <p><math>D_{0-1th}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p><math>\Sigma</math>Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</p>	
		Angka Stunting	<p>Angka Stunting = <math>(\Sigma \text{Balita sangat pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\% + (\Sigma \text{ Balita pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\%</math></p> <p>Dimana :</p>	

			<p><math>\Sigma</math>Balita sangat pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p><math>\Sigma</math>Balita pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p><math>\Sigma</math>Balita = Jumlah balita pada waktu tertentu</p>	
15	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	
		Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian Nilai Indeks yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Nilai skor aspek kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan anti diskriminasi	KESBANG
17	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Nilai skor aspek hak-hak politik Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	KESBANG
18	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Nilai skor aspek lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen	KESBANG
19	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	<p><math>C = V \times H / R</math></p> <p><math>R = H \times V / C</math></p> <p>R= Risiko</p> <p>V= vulnerability (kerentanan)</p> <p>H= Hazard (bahaya)</p> <p>C= Kapasitas (kemampuan)</p> <p>Risiko (kerugian) berbanding lurus dengan besarnya ancaman (bahaya) dan kerentanan</p> <p>Kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan (kapasitas)</p>	BPBD

20	Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Provinsi = (30%x IKA) + (30% x IKU) + (40%xIKTL) IKLH = indeks kualitas Lingkungan Hidup IKA =Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	BLHD
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	------

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERZALDI ROSMAN

Jabatan : GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang; Januari 2019

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**ERZALDI ROSMAN**

Lampiran  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

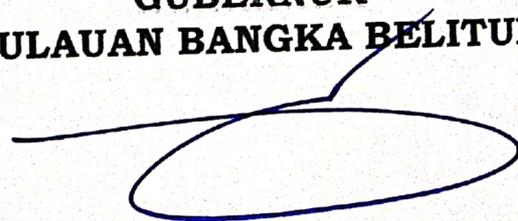
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90
2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,85
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamun Asing dan Indonesia)	389.009
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,16
4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,57
5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,65
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	100
7.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,29
8.	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60
9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,15
10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,31
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,10
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	11,43
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,40
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	11,89
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,83
14.	Meningkatnya derajat	Angka Harapan Hidup	70,16

	kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	22
		Angka Kematian Bayi	7.180
		Angka Stunting	28
15.	Meningkatnya Tata kelolapemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,39
16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76
17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,76
18.	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33
19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,20
20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,96

**Rincian Anggaran :**

Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	: Rp. 1.257.737.215.584,03
Anggaran Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	: Rp. 262.392.491.561,83
Anggaran Urusan Pilihan	: Rp. 192.088.535.715,35
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	: Rp. 1.214.803.456.971,51
<b>Total Anggaran Tahun 2019</b>	<b>: Rp. 2.922.021.699.832,72</b>

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**ERZALDI ROSMAN**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERZALDI ROSMAN

Jabatan : GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang; Oktober 2019

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**ERZALDI ROSMAN**

Lampiran  
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2019

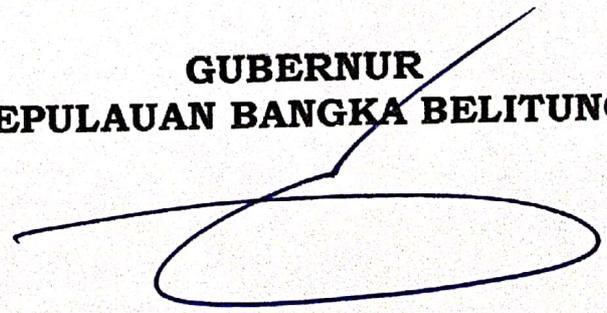
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90
2.	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,85
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	389.009
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,16
4.	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,57
5.	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,65
6.	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	100
7.	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,29
8.	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60
9.	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,15
10.	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,31
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09
12.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,10
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	11,43
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,40
13.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	11,89
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,83

14.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,16
		Angka Kematian Ibu	22
		Angka Kematian Bayi	7.180
		Angka Stunting	28
15.	Meningkatnya Tata kelolapemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,39
16.	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76
17.	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,76
18.	meningkatkan kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33
19.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,20
20.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,96

**Rincian Anggaran :**

Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	: Rp. 1.314.773.952.715,58
Anggaran Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	: Rp. 246.265.041.258,30
Anggaran Urusan Pilihan	: Rp. 199.762.335.742,95
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	: Rp. 1.303.902.489.833,16
<b>Total Anggaran Perubahan Tahun 2019</b>	<b>: Rp. 3.064.703.819.549,99</b>

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**ERZALDI ROSMAN**